

LAKIP



LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA

2025



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ikhtisar Eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar merupakan gambaran pelaksanaan perencanaan kinerja Tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029.

Perencanaan kinerja tersebut disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan tujuan serta sasaran organisasi yang selaras dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029.

Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas **4 (empat) program**, **9 (sembilan) kegiatan**, dan **23 (dua puluh tiga) sub kegiatan** yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator penetapan kinerja perangkat daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan **3 (tiga) sasaran strategis** yang menjadi fokus kinerja organisasi pada Tahun 2025.

Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam **indikator kinerja, target kinerja, serta capaian kinerja pada Tahun 2025** sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Uraian mengenai sasaran strategis beserta indikator kinerja, target, dan capaian kinerja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Predikat Sangat Baik	Predikat Sangat Baik	100 %
Meningkatnya kualitas penanaman modal	Nilai Penanaman Modal	Rp. 600.000.000.000.-	Rp. 636.205.642.832,-	106 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Predikat A	Predikat A	100%
KINERJA RATA RATA				100%

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Indikator Kinerja : Indeks Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari target sebesar Predikat Sangat Baik, realisasi capaian Predikat Sangat Baik, berarti tingkat pencapaian 100 %.
2. Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas penanaman modal dengan Indikator Kinerja : Nilai Penanaman Modal dari target sebesar Rp. 600.000.000.000,- realisasi sebesar Rp. Rp. 636.205.642.832,- berarti tingkat pencapaian 106 %.
3. Sasaran Strategis : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja : Predikat SAKIP dari target Predikat A (Nilai 82,00) , realisasi capaian Predikat A (Nilai 82,25) berarti tingkat pencapaian 100 %.

4.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Sasaran menunjukkan bahwa tingkat pencapaian tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan dari 3 (Tiga) Indikator Kinerja yang diukur semuanya mencapai target, ini menandakan bahwa pelaksanaan kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pencapaiannya sangat baik dan berhasil (100%).

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan beberapa program utama yang berfokus pada:

- peningkatan promosi Penanaman Modal
- peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan;
- peningkatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Peningkatan akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka pencapaian **sasaran strategis**, pelaksanaan program dan kegiatan pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025** didukung oleh anggaran operasional sebesar **Rp. 2.816.549.242,-**. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar **Rp. 2.694.319.017,-** atau dengan **persentase realisasi sebesar 95,66%**.

Adapun total anggaran sebesar **Rp. 2.816.549.242,-** tersebut terdiri atas beberapa komponen belanja sebagai berikut:

1. **Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN**, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.294.145.442,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 2.219.024.712,-** atau dengan **persentase realisasi sebesar 96,73%**.
2. **Anggaran Operasional ADU dan Non ADUM**, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 522.403.800,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 475.294.305,-** atau dengan **persentase realisasi sebesar 90,98%**.

Secara umum, tingkat realisasi anggaran pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah berjalan dengan baik serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar antara lain melalui:

1. **Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan**, melalui penerapan sistem pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel serta pemanfaatan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik.
2. **Peningkatan promosi dan fasilitasi penanaman modal**, dengan melakukan kegiatan promosi potensi investasi daerah serta memberikan pendampingan kepada calon investor dan pelaku usaha.
3. **Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha**, guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan berusaha serta kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal.
4. **Penguatan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait**, dalam rangka mempercepat proses penerbitan perizinan serta meningkatkan efektivitas pelayanan terpadu satu pintu.
5. **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur**, melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi dalam bidang pelayanan publik dan penanaman modal.
6. **Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi**, untuk mendukung proses pelayanan perizinan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.
7. **Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha**, terkait prosedur, persyaratan, dan kemudahan pelayanan perizinan berusaha di daerah.

Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 dapat tercapai secara optimal serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan iklim investasi di Kabupaten Polewali Mandar.



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menjelaskan dan menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun 2025 sebagai komitmen untuk dapat meningkatkan kinerja instansi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta capaian sasaran startegis untuk mewujudkan ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Meningkatkan kualitas penanaman moda***, sesuai yang telah diterapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029

Hasil pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu tidak lepas dari kerjasama dan kerja keras seluruh pejabat dan staf dalam merealisasikan seluruh program dan kegiatan, juga peran masyarakat sebagai pengguna fasilitas pelayanan publik di DPMPTSP serta aparat pemerintah

Kabupaten Polewali Mandar dalam perumusan kebijakan maupun implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait telah memberikan dukungan dan bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 dapat diselesaikan sebagai wujud dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025. Disamping itu laporan ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu program / kegiatan dengan menggunakan indikator yang terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini dimaksud untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien serta perkiraan manfaat dan dampak yang ditimbulkan.

Disadari walaupun didalam penyusunan LAKIP ini telah diusahakan secara maksimal namun masih banyak kekurangan atau kelemahannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 disampaikan, atas perhatian dan masukan dari semua pihak, diucapkan terima kasih. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 bermanfaat bagi kita semua dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Polewali, 12 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Polewali Mandar.



YENGGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si

Jabatan : Pembina Utama Muda

NIP : 19760522 199412 1 001

DAFTAR ISI

KHTISAR EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas, Pokok dan Fungsi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
A. Rencana Strategis	30
B. Penetapan Kinerja Tahun 2025	36
C. Instrumen Pendukung Tahun 2025.....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	43
A. Akuntabilitas Kinerja	43
B. Akuntabilitas Keuangan	109
BAB IV PENUTUP	120
LAMPIRAN :	
I. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
II. Pengukuran Kinerja Tahun 2025	
III. Realisasi Anggaran Tahun 2025	
IV. Pohon Kinerja Perangkat Daerah 2025	
V. Laporan Monev Rencana Aksi 2025	

DAFTAR TABEL

Tabel	1	:	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon / Pejabat ASN	14
Tabel	2	:	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Golongan ASN	15
Tabel	3	:	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan ASN	15
Tabel	4	:	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin ASN	16
Tabel	5	:	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan PPPK Penuh Waktu	17
Tabel	6	:	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Golongan PPPK Penuh Waktu	17
Tabel	7	:	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pendidikan Penuh Waktu	18
Tabel	8	:	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin PPPK Penuh Waktu	19
Tabel	9	:	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan PPPK Paruh Waktu	19
Tabel	10	:	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Golongan PPPK Paruh Waktu	20
Tabel	11	:	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan PPPK Paruh Waktu	21
Tabel	12	:	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin PPPK Paruh Waktu	21
Tabel	13	:	Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar	22
Tabel	14	:	Struktur Keuangan DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar	27
Tabel	15	:	Tujuan dan sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029	35

Tabel 16	:	Penetapan Kinerja 2025 DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar	36
Tabel 17	:	Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tahun 2025	44
Tabel 18	:	Target dan Realisasi Tahun 2025 Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	47
Tabel 19	:	Perbandingan target dan realisasi Tahun 2022-2025 Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	48
Tabel 20	:	Efisiensi penggunaan Anggaran tahun 2025 pada Program Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	55
Tabel 21	:	Tren Kinerja Pelayanan Perizinan (IKM)	65
Tabel 22	:	Data rekapitulasi izin yang diterbitkan DPMPTSP Tahun 2025	68
Tabel 23	:	Target dan Realisasi Tahun 2025 Indikator Kinerja Nilai Penanaman Modal	82
Tabel 24	:	Data Jumlah Perusahaan dan Jumlah penyerapan Tenaga Kerja di Perusahaan Tahun 2025	84
Tabel 25	:	Perbandingan target dan realisasi tahun 2022-2025 indikator kinerja Nilai Penanaman Modal	85
Tabel 26	:	Efisiensi penggunaan anggaran tahun 2025 pada program indicator Nilai Penanaman Modal	91
Tabel 27	:	Data potensi investasi kabupaten polewali mandar, tahun 2025	96
Tabel 28	:	Data indicator kinerja penilaian predikat SAKIP DPMPTSP, Tahun 2025	100
Tabel 29	:	Perbandingan target dan realisasi tahun 2021-2025 indikator kinerja Predikat SAKIP	101
Tabel 30	:	Data indicator Predikat SAKIP DPMPTSP, Tahun 2020-2025	103
Tabel 31	:	Efisiensi penggunaan anggaran tahun 2025 pada program dan kegiatan Indikator Predikat SAKIP	107

Tabel 32	:	Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2025	110
Tabel 33	:	Perbandingan realisasi anggaran tahun 2021 - 2025	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	: Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Tahun 2025	7
Gambar	2	ASN, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu DPMPTSP Tahun 2025	14
Gambar	3	Beranda depan Aplikasi OSS	38
Gambar	4	Beranda depan Aplikasi SIMBG	39
Gambar	5	Beranda depan Aplikasi SRIKANDI	40
Gambar	6	Beranda depan WEBSITE DPMPTSP	40
Gambar	7	Beranda depan MEDSOS DPMPTSP	41
Gambar	8	Diagram Batang Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerjaj 2025 DPMPTSP	45
Gambar	9	Penyampaian informasi pelayanan Perizinan	56
Gambar	10	Kegiatan pelayanan perizinan	65
Gambar	11	Pelayanan Mobile Perizinan	75
Gambar	12	Pelayanan MPP DPMPTSP	78
Gambar	13	Kegiatan peninjauan perizinan	80
Gambar	14	Kegiatan inspeksi laporan terhadap pelaku usaha	94
Gambar	15	Pendampingan pelaporan LKPM pada pelaku usaha	95

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap instansi pemerintah dituntut untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut adalah melalui penyusunan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, yang mengatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. LAKIP disusun sebagai bentuk laporan kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pengelolaan penanaman modal di daerah. Melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan terintegrasi, instansi ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah dituntut untuk terus meningkatkan kinerja organisasi, khususnya dalam hal penyederhanaan proses perizinan, peningkatan kemudahan berusaha, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan kinerja yang terukur dan sistematis agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah.

Penyusunan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025** pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. Laporan ini memuat informasi mengenai capaian kinerja, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan adanya LAKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa mendatang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu.

Pembentukan dan penyelenggaraan pelayanan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses perizinan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh layanan perizinan dan nonperizinan.

Selain itu, dinas ini juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar berupaya memberikan pelayanan yang cepat, transparan, mudah, dan terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi serta meningkatkan profesionalisme aparatur. Hal ini dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (LAKIP) Tahun 2025 ini antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029.

6. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi , tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Maksud dan Tujuan Penyusunan

LAKIP 2025_DPMPTSP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama satu tahun anggaran berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP ini adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun 2025.
2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

B. Kedudukan Tugas, Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah.

1. Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam kedudukannya, DPMPTSP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta merupakan bagian dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

2. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu.

Tugas tersebut meliputi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengembangan dan promosi penanaman modal, serta pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal di daerah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Pelaksanaan pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
5. Pelaksanaan promosi penanaman modal dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah.
6. Pelaksanaan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal.
7. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi penanaman modal serta pelayanan perizinan.
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2020 adalah sebagai berikut

Gambar 1: Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Tahun 2025

Lampiran Peraturan Bupati Polewali Mandar
 Nomor : 53 Tahun 2021
 Tanggal : 07 Januari 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPALA DINAS
I NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda Nip. 19760522 199412 1 001

SEKRETARIS
MUHAMMAD DARWIS, S.STP, M.M Pangkat : Pembina Tk. I Nip. 19780707 199612 1 001

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
WAHYUNINGSIH, SE Pangkat : Penata Tk.I Nip. 19791005 200212 2 007
PELAKSANA
MUSDALIFAH, S.Sos Pangkat : Penata Nip. 19620227 200801 2 008
ERNAWATI FRANS, S.IP Pangkat : Penata Tk. I Nip. 19830105 201901 2 047
LISMA INDRADIANA, SE Pangkat : Penata Tk. I Nip. 19860409 201012 2 029
YUNIANI, S.M Pangkat : Penata Muda Tk. I Nip. 11980523 202012 2 091

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
A.ZAKARIA MAKKARUMPA, S.AP Pangkat : Penata Nip. 19720303 200701 1 038
YUSRI, SE Pangkat : Penata Tk.I Nip. 19740504 200801 1 021
NUR HIKMAH, S.E Pangkat : IX Nip. 19850902 202321 2 021

KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL
ANDI NURHAYAT, S.IP., M.Si Pangkat : Pembina Nip. 19871210 200701 1 003

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL / PELAKSANA
EKA SRY DHAMAYANTI, SE Pangkat : Penata Tk.I Nip. 19881202 201001 2 030
ANDI NURHAYAT, S.IP. Pangkat : Tk. I Nip. 19871210 200701 1 003

KEPALA BIDANG PENDAFTARAN, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DEDDY IRAWAN, S.Ag., M.Si Pangkat : Pembina Nip. 1197660302 201001 1 024

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL / PELAKSANA
ANDI ASRAH, SE, M.Si Pangkat : Penata Tk.I Nip. 19810426 201001 2 019
SRI RAHAYU, S.Sos Pangkat : Penata Muda Nip. 19971008 202304 2 001
CHAIRUNNISA AURELIA A. AMRIL, S.Tr., I.P Pangkat : Penata Muda Nip.
ABDUL RAHIM, S.IP Pangkat : IX Nip. 19810603 202521 1 007

KEPALA BIDANG PENINJAUAN DAN PENETAPAN SEKTOR A
FAHRANI BAHRUM, S.IP., M.Adm. Pemb Pangkat : Pembina Nip. 19871217 200701 2 001

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL / PELAKSANA
ANDI PAMUJI, SH, M.Si Pangkat : Penata Tk.I Nip. 19810529 201001 1 014
DARMAWATI, S.IP Pangkat : Penata Nip. 19800622 200701 2 013
SYABANIAH, S.IP Pangkat : Penata Nip. 19830707 201001 2 004
ST. RADIAH, S.Sos Pangkat : Penata Muda Nip. 20400701 202504 2 004

KEPALA BIDANG PENINJAUAN DAN PENETAPAN SEKTOR B
Hj. ANDI LISA YULIANTY, R, S.Pd Pangkat : Pembina Nip. 19740701 199404 2 001

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL / PELAKSANA
MUSTAJAB AMRULLAH, S.IP, M.Si Pangkat : Penata Nip. 19850103 200602 1 003
Hj. SURIYANTI, S.Sos Pangkat : Penata Tk. I Nip. 19890912 199103 2 013
NUR AWALIAH, S.Kom Pangkat : Penata Tk. I Nip. 19770502 200701 2 035
ANDI HAERAWANTI Pangkat : Penata Muda Nip. 19751110 200701 2 026

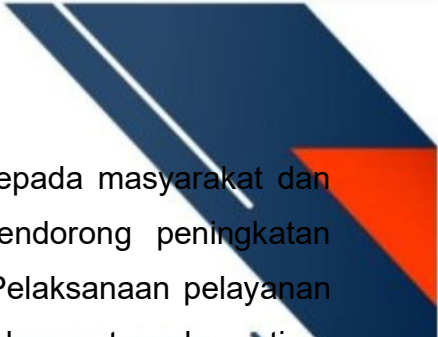
Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien.

Adapun susunan organisasi secara umum terdiri dari:

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat**, yang membawahi:
 - o Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. **Bidang Penanaman Modal**
4. **Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan**
5. **Bidang Peninjauan dan Penetapan sektor A**
6. **Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor B**
7. **Kelompok Jabatan Fungsional**, yang terdiri dari :
 - **Perencana Ahli Muda**
 - **Perencana Ahli Pertama**
 - **Analisis Keuangan Pusat/Daerah**
 - **Analisis Kebijakan Ahli Muda**
 - **Analisis Kebijakan Ahli Pertama**
 - **Pranata Perizinan Ahli Muda**
 - **Pranata Perizinan ahli Pertama**

Struktur organisasi tersebut dirancang untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang terintegrasi serta memastikan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu.



Sebagai instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha, DPMPTSP memiliki posisi strategis dalam mendorong peningkatan investasi daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, kepastian, transparansi, dan efisiensi dalam proses perizinan dan nonperizinan.

Dalam mendukung pembangunan daerah, DPMPTSP memiliki peran strategis antara lain dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di daerah, serta memberikan pelayanan perizinan yang berkualitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, kinerja organisasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan yang menjadi isu strategis organisasi, antara lain:

1. Optimalisasi kualitas pelayanan perizinan

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan menuntut peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, baik dari sisi prosedur, waktu pelayanan, maupun pemanfaatan teknologi informasi.

2. Peningkatan investasi daerah

Upaya menarik minat investor untuk menanamkan modal di daerah masih memerlukan strategi promosi investasi yang lebih efektif, termasuk penyediaan informasi potensi investasi daerah yang lengkap dan akurat.

3. Integrasi sistem pelayanan perizinan berbasis teknologi

Pelaksanaan pelayanan perizinan saat ini semakin mengarah pada sistem pelayanan berbasis elektronik, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung sistem pelayanan yang terintegrasi.

4. Koordinasi lintas perangkat daerah

Pelayanan perizinan seringkali melibatkan berbagai perangkat daerah teknis, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif agar proses penerbitan izin dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pengembangan kompetensi aparatur sangat diperlukan agar pegawai mampu memberikan pelayanan yang profesional serta mampu mengikuti perkembangan regulasi dan sistem pelayanan perizinan yang terus berkembang.

6. Pengawasan dan pengendalian penanaman modal

Pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal perlu terus ditingkatkan guna memastikan bahwa pelaku usaha melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja organisasi melalui perbaikan sistem pelayanan, penguatan koordinasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif dan pelayanan publik yang berkualitas.

Beberapa **isu strategis dan tantangan utama yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar** dalam upaya meningkatkan **nilai investasi daerah dan kualitas layanan perizinan** dapat diidentifikasi dari dokumen kinerja, kegiatan pemerintah daerah, serta dinamika implementasi sistem perizinan. Sebagai Berikut::

1. Rendahnya kepatuhan dan legalitas usaha (banyak usaha belum berizin)

Salah satu tantangan terbesar adalah masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha atau belum melaporkan kegiatan investasi.

- Pemerintah daerah masih harus **mendorong pelaku usaha untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)** melalui sistem OSS.
- Banyak pelaku usaha juga **belum tertib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)** yang menjadi dasar pengukuran realisasi investasi daerah.

Dampaknya: - Data investasi daerah menjadi **tidak akurat**.

- Sulit mengukur kontribusi sektor usaha terhadap ekonomi daerah.
- Potensi pajak dan retribusi daerah tidak optimal.

2. Literasi dan pemahaman pelaku usaha terhadap sistem OSS masih rendah

Perizinan saat ini menggunakan sistem **Online Single Submission (OSS)** berbasis **risiko**, namun banyak pelaku usaha, terutama UMKM, belum memahami mekanisme digital tersebut.

- DPMPSTSP Polman harus melakukan **bimbingan teknis dan sosialisasi OSS** agar **pelaku usaha dapat membuat akun dan memperoleh NIB**.
- Banyak pelaku UMKM belum familiar dengan sistem digital.
- Kesalahan pengisian data di OSS dapat memperlambat proses izin.
- Pelaku usaha masih bergantung pada bantuan petugas.

3. Pengawasan dan kepatuhan perizinan usaha masih lemah

Banyak usaha yang beroperasi tanpa izin atau tidak memenuhi persyaratan tekn

4. Keterbatasan data investasi dan integrasi sistem

Secara umum dalam pengelolaan penanaman modal daerah, terdapat tantangan dalam **integrasi data dan kualitas data investasi**.

Beberapa masalah yang sering muncul:

- Integrasi data OSS dengan sistem pemerintah daerah belum optimal.
- Data investasi dan pengawasan usaha masih terfragmentasi.
- Kualitas data pelaporan dari pelaku usaha tidak konsisten.

Dampaknya:

- Analisis potensi investasi daerah kurang akurat.
- Pengambilan kebijakan investasi kurang berbasis data.

5. Keterbatasan kapasitas SDM dan teknologi layanan

DPMPTSP daerah sering menghadapi keterbatasan:

- jumlah dan kapasitas SDM pelayanan perizinan,
- kemampuan analisis investasi,
- penguasaan teknologi digital pelayanan.

Hal ini menjadi tantangan karena:

- layanan perizinan sekarang **sepenuhnya digital dan berbasis risiko**,
- pengawasan usaha memerlukan kemampuan analisis data investas

6. Daya tarik investasi daerah masih perlu diperkuat

Selain aspek perizinan, tantangan penting adalah **menciptakan iklim investasi yang kompetitif** dibanding daerah lain.

Faktor yang mempengaruhi:

- keterbatasan promosi potensi investasi,
- infrastruktur ekonomi daerah,
- kesiapan lahan dan regulasi tata ruang,
- koordinasi antar perangkat daerah.

7. Akses layanan perizinan bagi masyarakat masih perlu diperluas

Untuk mengatasi hambatan geografis dan akses layanan, DPMPTSP bahkan harus melakukan **pelayanan perizinan mobile ke pasar atau wilayah kecamatan** agar masyarakat lebih mudah mengurus izin.

Ini menunjukkan bahwa:

- akses layanan belum merata,
- sebagian masyarakat masih kesulitan datang ke kantor layanan.

Secara umum, **isu strategis DPMPTSP Polewali Mandar** dapat dirangkum menjadi 5 poin utama:

1. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan dan pelaporan investasi.
2. Literasi digital pelaku usaha terhadap sistem OSS masih terbatas.
3. Pengawasan usaha dan penegakan kepatuhan izin belum optimal.
4. Integrasi dan kualitas data investasi daerah masih lemah.
5. Kualitas layanan dan daya tarik investasi daerah perlu terus ditingkatkan.

Tantangan DPMPTSP Polman bukan hanya soal mempercepat proses izin, tetapi juga **membangun ekosistem investasi yang tertib, transparan, dan berbasis digital**, sambil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha di daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar didukung oleh aparat ASN, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu dengan susunan sebagai berikut :



Gambar 2 : ASN, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar

KATEGORI ASN

a. Berdasarkan Eselon / Jabatan ASN

Tabel 1 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon/Pejabat ASN

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	II	1	-	1
2	III	3	2	5
3	IV	4	5	9
4	Staf	1	10	11
Jumlah		9	17	26

Jumlah pejabat struktural (Eselon II–IV) adalah **15 orang** sedangkan staf **11 orang**. Hal ini menunjukkan struktur organisasi relatif **cukup padat pada level struktural**, karena jumlah pejabat lebih banyak dibanding staf pelaksana.

Secara keseluruhan, komposisi pegawai menunjukkan bahwa organisasi memiliki **struktur kepemimpinan yang lengkap dari Eselon II sampai Eselon IV**, dengan dukungan staf yang cukup. Namun, proporsi pejabat struktural yang lebih besar dibanding staf mengindikasikan perlunya **optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia** agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi berjalan lebih efektif.

b. Berdasarkan Golongan ASN

Tabel 2 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Golongan ASN

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	I	-	-	-
2	II	-	-	-
3	III	5	15	20
4	IV	4	2	6
Jumlah		9	17	26

Secara umum, kondisi kepegawaian menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada **Golongan III**, yang berperan sebagai pelaksana utama kegiatan organisasi. Sementara itu, **Golongan IV** berfungsi sebagai tenaga senior yang mendukung kepemimpinan dan pengambilan kebijakan. Komposisi ini mencerminkan struktur sumber daya manusia yang cukup mendukung pelaksanaan tugas organisasi serta memiliki potensi pengembangan karier di masa depan.

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan ASN

Tabel 3 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan ASN

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD	-	-	-
2	SMP/Sederajat	-	-	-
3	SLTA/Sederajat	-	1	1
4	Sarjana Muda/D3	-	-	-
5	Strata 1 (S1)	3	14	17
6	Strata 2 (S2)	6	2	8
Jumlah		9	17	26

Secara umum, kondisi kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa **mayoritas pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi (S1 dan S2)**, sehingga sangat mendukung pelaksanaan tugas organisasi secara profesional. Selain itu, komposisi ini juga memberikan peluang pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan.

d. **Berdasarkan Jenis Kelamin ASN**

Tabel 4 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	9
2	Perempuan	17
Jumlah		26

Secara umum, kondisi kepegawaian berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa **pegawai perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki**. Namun demikian, kedua kelompok tetap memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Komposisi ini menunjukkan bahwa organisasi telah memberikan **kesempatan yang cukup terbuka bagi perempuan untuk berperan dalam berbagai posisi kerja**, sehingga mendukung prinsip kesetaraan gender dalam lingkungan kerja ASN.

KATEGORI PPPK PENUH WAKTU

a. Berdasarkan Jabatan PPPK Penuh Waktu

Tabel 5 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan PPPK Penuh Waktu

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Perencana Ahli Pertama	1	-	1
2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	-	1	1
Jumlah		1	1	2

Secara umum, keberadaan **2 orang PPPK penuh waktu** pada jabatan fungsional **Perencana Ahli Pertama** dan **Analisis Kebijakan Ahli Pertama** memberikan dukungan strategis terhadap pelaksanaan fungsi perencanaan dan analisis kebijakan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar. Ke depan, penguatan sumber daya manusia pada jabatan fungsional tertentu dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara lebih optimal.

b. Berdasarkan Golongan PPPK Penuh Waktu

Tabel 6 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Golongan PPPK Penuh Waktu

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IX	1	1	2
Jumlah		1	1	2

Secara umum, kondisi kepegawaian PPPK penuh waktu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa seluruh pegawai PPPK berada pada **Golongan IX** yang mendukung jabatan fungsional ahli pertama. Keberadaan PPPK tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas organisasi, khususnya dalam mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah.

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan PPPK Penuh waktu

Tabel 7 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan PPPK Penuh Waktu

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD	-	-	-
2	SMP/Sederajat	-	-	-
3	SLTA/Sederajat	-	-	-
4	Sarjana Muda/D3	-	-	-
5	Strata 1 (S1)	1	1	2
6	Strata 2 (S2)	-	-	-
Jumlah		1	1	2

Secara umum, kondisi kepegawaian PPPK penuh waktu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa seluruh pegawai PPPK memiliki kualifikasi pendidikan **Sarjana (S1)**. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki telah memenuhi persyaratan pendidikan yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi secara professional

d. Berdasarkan Jenis Kelamin PPPK Penuh Waktu

Tabel 8 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin PPPK Penuh Waktu

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1
2	Perempuan	1
Jumlah		2

Secara umum, kondisi PPPK penuh waktu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan jenis kelamin menunjukkan komposisi yang **seimbang antara laki-laki dan perempuan**. Kondisi ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inklusif serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas organisasi.

KATEGORI PPPK PARUH WAKTU

a. Berdasarkan Kelompok Jabatan PPPK Paruh Waktu

Tabel 9 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan PPPK Paruh Waktu

No.	Jabatan PPPK Paruh Waktu	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pengelola Umum Operasional	1	1	2
2	Operator Layanan Operasional	3	4	7
3	Pengelola Layanan Operasional	1	0	1
4	Penata Layanan Operasional	3	7	10
Jumlah		8	12	20

Secara umum, kondisi kepegawaian PPPK paruh waktu di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai ditempatkan pada jabatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa peran PPPK paruh waktu sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan publik serta kegiatan administrasi di lingkungan organisasi.

Jabatan **Penata Layanan Operasional** merupakan jumlah terbanyak yaitu **10 orang**, yang menunjukkan bahwa sebagian besar PPPK paruh waktu berperan langsung dalam mendukung proses pelayanan administrasi dan operasional.

Jabatan **Operator Layanan Operasional sebanyak 7 orang**, berperan penting dalam membantu proses pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pengoperasian sistem pelayanan perizinan serta pengolahan data pelayanan.

Keberadaan **Pengelola Umum Operasional dan Pengelola Layanan Operasional** berperan dalam membantu koordinasi kegiatan operasional dan administrasi sehingga pelaksanaan tugas organisasi dapat berjalan dengan lebih tertib dan efektif.

b. Berdasarkan Golongan PPPK Paruh Waktu

Tabel 10 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Golongan PPPK Paruh Waktu

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	I	-	1	1
2	II	4	4	8
3	III	4	7	11
4	IV	-	-	-
Jumlah		8	12	20

Secara umum, kondisi PPPK paruh waktu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar didominasi oleh pegawai **Golongan III**, yang menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga pendukung memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan tugas operasional pelayanan dan administrasi di lingkungan organisasi.

Sebaran golongan tersebut menunjukkan bahwa PPPK paruh waktu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar memiliki komposisi yang cukup mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan kegiatan operasional organisasi.

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan PPPK Paruh Waktu

Tabel 11 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan PPPK Paruh Waktu

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD	-	-	-
2	SMP/Sederajat	-	1	1
3	SLTA/Sederajat	4	4	8
4	Sarjana Muda/D3	-	-	-
5	Strata 1 (S1)	4	7	11
6	Strata 2 (S2)	-	-	-
Jumlah		8	12	20

Secara umum, kondisi PPPK paruh waktu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan **S1 dan SMA**, yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia cukup mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan kegiatan operasional organisasi. Komposisi pendidikan tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar secara umum telah memiliki kapasitas pendidikan yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi, khususnya dalam memberikan pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan

d. Berdasarkan Jenis Kelamin PPPK Paruh Waktu

Tabel 12 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin PPPK Paruh Waktu

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	8
2	Perempuan	12
Jumlah		20

Kondisi kepegawaian PPPK Paruh Waktu di DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 menunjukkan **dominasi pegawai perempuan dibanding laki-laki**, namun komposisi tersebut masih dalam kategori **relatif seimbang** dan dapat mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik secara efektif.

Keberadaan pegawai perempuan yang lebih banyak dapat mendukung pelayanan publik yang membutuhkan ketelitian, komunikasi, dan pelayanan administratif yang baik.

Tenaga Outsourcing (Tenaga Kebersihan Kantor)

Tahun 2025, **DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar** memiliki **1 orang tenaga outsourcing** yang bertugas sebagai **tenaga kebersihan kantor**. Keberadaan **1 orang tenaga outsourcing sebagai tenaga kebersihan** di DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 berperan sebagai **tenaga pendukung operasional kantor** yang membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja. Meskipun jumlahnya terbatas, keberadaan tenaga ini cukup penting dalam mendukung kelancaran aktivitas perkantoran dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA 2025_DPMPTSP

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2025, **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar** juga didukung oleh ketersediaan **sarana dan prasarana yang cukup memadai**. Keberadaan sarana dan prasarana tersebut memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Sarana dan prasarana yang memadai dapat meningkatkan **efektivitas dan efisiensi kerja aparatur**, memperlancar proses pelayanan, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Selain itu, dukungan fasilitas kerja yang baik juga memungkinkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan sehingga pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung **pencapaian target kinerja organisasi**, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar kepada masyarakat.

Tabel 13 :

**Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2025**

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Papan Informasi	2	2	-	-
2	Server	1	1	-	-
3	Rak Koran	1	1	-	-
4	Wireies Roulter	1	1	-	-
5	Siaber	1	1	-	-
6	AC	6	5	1	-

7	Jam Dinding	2	2	-	-
8	Komputer PC	20	16	2	2
9	Kursi Kayu	7	4	1	2
10	Kursi Lipat	5	4	1	-
11	Kursi Putar	2	2	-	-
12	Lemari Kayu	3	2	1	-
13	Meja ½ Biro	9	5	4	-
14	Meja Komputer	6	6	-	-
15	Printer	33	23	5	5
16	Sapu	2	2	-	-
17	Sendok Sampah	2	2	-	-
18	Tempat Sampah	3	3	-	-
19	UPS	7	7	1	1
20	Gorden Panjang	5	5	-	-
21	Gorden Pendek	8	8	-	-
22	TV	7	7	1	1
23	Meja Pelayanan	6	6	-	-
24	Papan Struktur	1	1	-	-
25	Papan Visi dan Misi	1	1	-	-
26	Kursi Tunggu	3	3	-	-
27	Meja Gantung	1	1	-	-
28	Sekat	2	2	-	-
29	Laptop	12	9	2	1
30	Motor	9	7	1	1
31	Dispenser	5	4	1	-
32	Filling Cabinet	3	3	-	-
33	Gorden Biasa	2	2	-	-
34	Kursi Panjang	1	1	-	-
35	Kursi Plastik	4	4	-	-
36	Kursi Putar Besar	4	3	1	-
37	Meja Biro	7	5	2	-
38	Meja Panjang	1	1	-	-
39	Mesin Ketik	2	1	1	-
40	Monitor	2	1	1	-
41	Sapu Ijuk	1	1	-	-
42	Lemari Arsip 2 Pintu	6	4	2	-
43	Meja Kerja 1 Biro	5	5	-	-
44	Meja Kerja Staf	17	15	2	-
45	Meja Rapat	9	9	-	-
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	4	-	-
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	13	9	4	-
49	Kursi Kerja Staf	5	5	-	-
50	Kursi Tunggu	6	6	-	-
51	Kursi Tamu/Ruang Tunggu	1	1	-	-
52	Kursi Tamu Eselon III	1	1	-	-

53	Kursi Rapat	59	44	15	-
54	Sofa Ruang pejabat Eselon II	1	1	-	-
55	Kulkas	1	1	-	-
56	Wireles Toa	1	1	-	-
57	LCD Proyektor	1	1	-	-
58	Layar Proyektor	1	1	-	-
59	Tempat Parkir Kendaraan	1	1	-	-
60	Drone	1	1	-	-
61	Kursi Susun	5	5	-	-

**Sumber Data : Buku Inventaris Barang Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Polewali Mandar , 2025**

Berdasarkan **Tabel Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025**, secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perangkat daerah berada dalam **kondisi cukup baik dan masih dapat menunjang pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi** dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagian besar fasilitas kerja seperti **papan informasi, server, rak koran, router jaringan, sistem aplikasi (Siaber), meja pelayanan, papan struktur organisasi, papan visi dan misi, serta fasilitas ruang pelayanan** berada dalam kondisi **baik**. Hal ini menunjukkan bahwa sarana yang berkaitan langsung dengan **pelayanan publik dan sistem informasi** telah tersedia dan berfungsi dengan baik untuk mendukung kelancaran pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa sarana yang berada dalam **kondisi kurang baik maupun rusak**, terutama pada peralatan penunjang operasional kerja seperti **komputer PC, printer, kursi, meja kerja, lemari arsip, serta beberapa perangkat elektronik lainnya**. Misalnya, dari **20 unit komputer PC terdapat 16 unit dalam kondisi baik, 2 unit kurang baik, dan 2 unit rusak**, sementara **printer sebanyak 33 unit terdiri dari 23 unit kondisi baik, 5 unit kurang baik, dan 5 unit rusak**. Kondisi ini menunjukkan bahwa beberapa peralatan kerja sudah mulai mengalami penurunan fungsi akibat usia pemakaian atau intensitas penggunaan yang tinggi.

Selain itu, beberapa sarana penunjang lainnya seperti **AC, kursi kayu, kursi lipat, lemari kayu, meja ½ biro, serta kursi rapat** juga terdapat yang berada dalam kondisi kurang baik, sehingga memerlukan **pemeliharaan atau penggantian secara bertahap** agar tetap dapat menunjang kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai.

Secara keseluruhan, kondisi sarana dan prasarana di **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar** masih cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat, namun tetap diperlukan **upaya pemeliharaan, perbaikan, serta pengadaan sarana baru secara bertahap** guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kinerja organisasi di masa mendatang.

ASPEK KEUANGAN ORGANISASI 2025_DPMPTSP

Struktur keuangan **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar** pada Tahun 2025 menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup baik dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara pagu anggaran, realisasi anggaran, dan sisa anggaran yang tersedia pada akhir tahun anggaran.

Total **pagu anggaran** yang dialokasikan pada Tahun 2025 sebesar **Rp 2.816.549.242**. Dari jumlah tersebut, anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar **Rp 2.694.319.017**, sehingga terdapat **sisa anggaran sebesar Rp 122.230.225** dengan **persentase capaian realisasi anggaran sebesar 95,66%**.

Tingkat realisasi anggaran yang mencapai lebih dari **95%** menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar telah berjalan dengan **efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan**. Selain itu, capaian tersebut juga mencerminkan adanya **pengelolaan keuangan yang cukup optimal**, dimana sebagian besar anggaran dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sisa anggaran yang masih terdapat pada akhir tahun anggaran dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti **efisiensi pelaksanaan kegiatan, penghematan belanja, atau adanya kegiatan yang tidak sepenuhnya terealisasi sesuai rencana awal.** Namun demikian, secara keseluruhan tingkat realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa **kinerja pengelolaan keuangan DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun 2025 berada pada kategori sangat baik.**

Berdasarkan data tersebut, struktur keuangan DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 menunjukkan **kinerja pengelolaan anggaran yang efektif dengan tingkat realisasi sebesar 95,66%**, sehingga sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berikut **tabel Struktur Keuangan DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025** berdasarkan data yang Anda berikan:

Tabel 14:

Struktur Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Pagu Anggaran	2.816.549.242	100%
2	Realisasi Anggaran	2.694.319.017	95,66%
3	Sisa Anggaran	122.230.225	4,34%

Keterangan:

- Pagu Anggaran merupakan total anggaran yang dialokasikan untuk DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025.
- Realisasi Anggaran adalah jumlah anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- Sisa Anggaran merupakan anggaran yang tidak terealisasi sampai akhir tahun anggaran.
- Persentase realisasi sebesar **95,66%** menunjukkan bahwa penyerapan anggaran berada pada kategori **sangat baik**.

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
(Memuat penjelasan singkat tentang pentingnya akuntabilitas, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan laporan)
- B. Kedudukan tugas, pokok dan fungsi
(memuat penjelasan umum tentang perangkat daerah, dengan penekanan pada aspek strategis dan permasalahan utama organisasi meliputi isu strategis tugas dan fungsi organisasi, kondisi sumber daya pegawai dan sarana prasarana penunjang kinerja organisasi, aspek keuangan dan sistematika LAKIP).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
(memuat penjelasan singkat tentang Renstra, meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja Utama/Sasaran)
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2025
(Memuat Target Kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025)
- C. INSTRUMEN PENDUKUNG TAHUN 2025
(Memuat penjelasan tentang instrument yang mendukung kemudahan pelaksanaan kinerja selama tahun 2025, seperti penggunaan system yang berbasis elektronik)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Akuntabilitas Kinerja

- Diuraikan per tujuan, per sasaran dan per indikator sasaran
- Untuk setiap indikator sasaran dijelaskan dengan 5 syarat minimal data kinerja berupa table atau grafik dan penjelasan memadai, yaitu :
 - Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - Membandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya;
 - Uraikan keberhasilan /kegagalan serta solusi yang dilakukan;
 - Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan;
 - Analisis efisiensi sumber daya (Anggaran).

B. Akuntabilitas keuangan

- Menguraikan informasi secara detail terkait akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan umum atas capaian kinerja, serta langkah-langkah dimasa datang organisasi.

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- Realisasi Anggaran Tahun 2025
- Pohon kinerja Perangkat Daerah 2025
- Laporan monev rencana Aksi 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan hasil yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka menengah maupun tahunan sebagai implementasi dari tujuan organisasi. Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Polewali Mandar disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Sasaran strategis ini berfungsi sebagai arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah serta menjadi dasar dalam pengukuran kinerja organisasi.

Adapun sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar yang tertuang dalam RENSTRA Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**

Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Pelayanan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah : *Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*.

2. **Meningkatnya kualitas penanaman modal**

Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Polewali Mandar melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, promosi potensi daerah, serta peningkatan kemudahan pelayanan perizinan berusaha. Peningkatan investasi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah : *Nilai Penanaman Moda*

3. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**

Sasaran strategis ini bertujuan untuk Peningkatan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui penerapan **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** secara konsisten, mulai dari tahap perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja. Dengan penerapan sistem tersebut, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diharapkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran strategis serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi.. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah : *Predikat SAKIP*

Dengan adanya sasaran strategis tersebut, DPMPSTSP Kabupaten Polewali Mandar diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar merupakan dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan strategis dalam pembangunan Penanaman Modal di Kabupaten Polewali Mandar. Hal tersebut ditetapkan untuk mencapai Visi Kabupaten Polewali Mandar yaitu :

“Polewali Mandar Sehat, Cerdas dan Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Agama, Budaya dan Berwawasan Lingkungan”

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan 7 Misi RPJMD Polewali Mandar 2025-2029, adapun Misi yang berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Misi ke 1 yaitu *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme”* dan Misi ke 3

yaitu : *“Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan serta mampu menyelesaikan tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat”*. Guna Mencapai Visi dan Misi diatas,

diperlukan suatu tujuan dan Sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun,. Adapun Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut

Tujuan :

Membaiknya iklim investasi daerah

Sasaran :

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**
- 2. Meningkatnya kualitas penanaman modal**
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**

Untuk merelisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran dengan cara menentukan strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu :

Strategi :

- Penyederhananaan Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta penguatan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Identifikasi potensi unggulan daerah dari sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta Penyusunan profil dan peta peluang investasi daerah yang informatif, akurat dan mudah diakses oleh Calon Investor

- c. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja melalui penerapan indikator kinerja yang SMART dan cascading yang runtut pada Renstra serta memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran untuk pencapaian perjanjian kinerja pada seluruh perangkat daerah

Arah Kebijakan :

- a. Digitalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Penguatan Daya Tarik Investasi Daerah
- d. Peningkatan Promosi dan Fasilitasi Investasi
- e. Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif
- f. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kapatuhan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal
- g. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- h. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
- i. Peningkatan Tertib Ketatausahaan Kantor;

Sasaran strategis yang ditetapkan oleh DPMPTSP tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi semata, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian indikator pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar secara lebih luas. Peningkatan nilai investasi daerah, misalnya, secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Investasi yang berkembang dengan baik juga akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini menjadi faktor penting dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Polewali Mandar. Pelayanan yang efektif dan efisien juga dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pemerintah daerah, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan demikian, sasaran strategis yang ditetapkan oleh DPMPSTSP Kabupaten Polewali Mandar memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Adapun Tabel lengkap dari Tujuan dan sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel. 15

**TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tahun 2025-2029**

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah	Membaiiknya Iklim Investasi Daerah		Persentase Peningkatan Investasi	Persentase	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya kualitas penanaman modal	Nilai Penanaman Modal	Rupiah	662.029.288.456	667.426.460.620	672.823.632.784	678.220.804.948	683.617.977.112	683.617.977.112
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A	A	A	A

B. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 merupakan komitmen kinerja yang disusun sebagai bentuk perjanjian antara pimpinan perangkat daerah dengan Kepala Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan kinerja ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, serta target yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Penetapan Kinerja tersebut mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar. Melalui penetapan kinerja ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil yang mendukung peningkatan pelayanan publik serta pembangunan daerah.

Adapun Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16 :

Penetapan Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1 Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Predikat Sangat Baik

2	Meningkatnya kualitas penanaman modal	1	Nilai Penanaman Modal	Rp. 600.000.000.000
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Predikat SAKIP	Predikat A

Berdasarkan tabel tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menetapkan tiga sasaran strategis utama pada Tahun 2025, yaitu peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, peningkatan kualitas penanaman modal, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Ketiga sasaran tersebut menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025 guna mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan investasi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

B. Instrumen Pendukung Tahun 2025

Dalam mendukung kemudahan pelaksanaan kinerja selama tahun 2024 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar sangat ditunjang dengan adanya penggunaan system yang berbasis elektronik, seperti APLIKASI OSS APLIKASI SIM BG dan APLIKASI SRIKANDI. Dukungan Kinerja lain berupa informasi Kinerja melalui WEBSITE, Sosial Media (SOSMED) Instagram dan Facebook

APLIKASI OSS



Layanan OSS (Online Single Submission) meliputi berbagai perizinan berusaha, seperti izin usaha dan izin komersial. Jenis perizinan yang dilayani OSS :Izin usaha, Izin komersial atau operasional, Izin lokasi, Izin mendirikan bangunan, Izin lingkungan dan Kewajiban lain seperti Standar Nasional Indonesia (SNI)

Gambar 3 : Beranda depan Aplikasi OSS

Manfaat OSS :

1. Memudahkan pelaku usaha untuk memulai produksi secara bersamaan
2. Memudahkan pelaku usaha untuk mengurus izin berusaha
3. Memudahkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan secara elektronik
4. Memudahkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan berusaha berbasis risiko

Akses portal oss.go.id

APLIKASI SIMBG



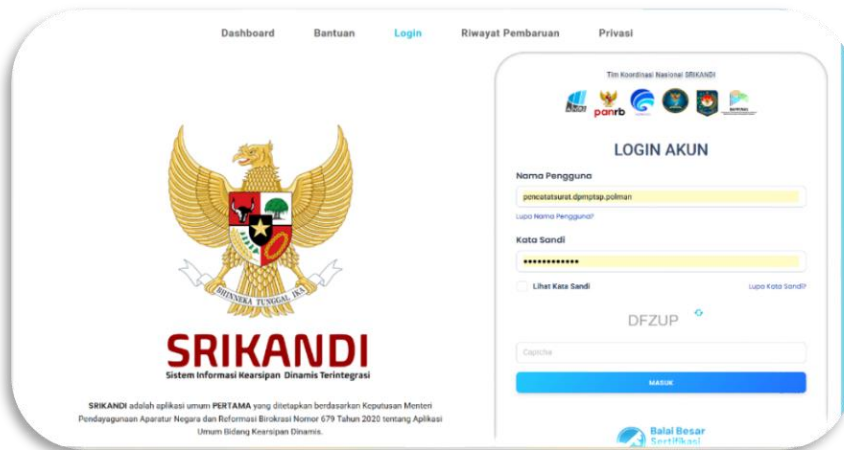
Gambar 4 : Beranda depan Aplikasi SIMBG

SIM BG untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, sehingga dapat meningkatkan ekosistem investasi dan perekonomian. Sehingga Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, semakin intensif dalam menerapkan pelayanan perizinan secara elektronik sebagai wujud pengembangan sistem pemerintahan elektronik.

Manfaat SIMBG adalah meningkatkan pelayanan penerbitan PBG, SLF, SBKBG dan RTB kepada masyarakat di daerah melalui pendekatan sistem online yang terintegrasi secara elektronik. SIMBG juga bermanfaat dalam menerapkan standardisasi regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung serta menyederhanakan dan mempermudah penerbitan PBG/SLF sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- **SIMBG. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung** yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan. Akses [portal simbg.pu.go.id](http://portal.simbg.pu.go.id)

APLIKASI SRIKANDI



Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI merupakan aplikasi yang diluncurkan Pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Gambar 5 : Beranda depan Aplikasi SRIKANDI

Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi pengelolaan arsip elektronik yang komprehensif dan terpadu yang dikembangkan oleh ANRI. Aplikasi Srikandi ini sangat mendukung kegiatan kantor dalam hal persuratan. Akses portal.srikandi.arsip.go.id



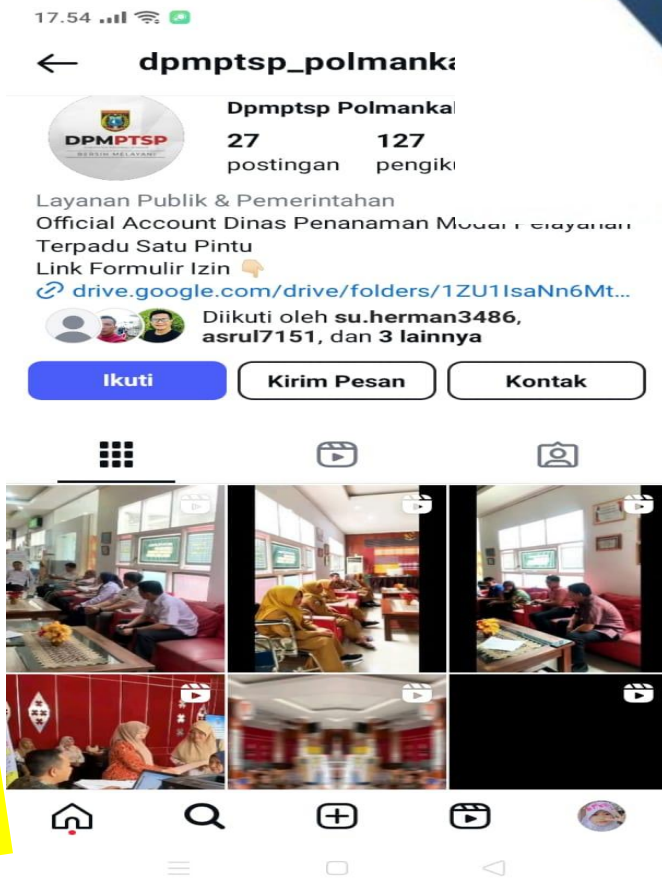
Gambar 6 : Beranda depan WEBSITE DPMPTSP



Website menyajikan informasi Kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar yang memuat Profil Organisasi, Informasi Layanan, Informasi Kinerja, Informasi Regulasi dan Informasi Berita Kegiatan Kinerja.




MEDSOS



Menyajikan informasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar dan Informasi Layanan Publik.



Gambar 7 : Beranda depan MEDSOS DPMPTSP



Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar juga memanfaatkan berbagai instrumen pelayanan berbasis elektronik sepanjang tahun 2025, antara lain melalui pemanfaatan aplikasi **Online Single Submission (OSS)**, **SIMBG**, **SRIKANDI**, website resmi pelayanan, serta penyelenggaraan **Pelayanan Menyapa Rakyat (MENRAP)**. Pemanfaatan berbagai instrumen tersebut merupakan bagian dari implementasi transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut terbukti mampu meningkatkan efisiensi waktu dan proses pelayanan, khususnya dalam hal percepatan pengajuan, verifikasi, serta penerbitan perizinan. Selain itu, sistem pelayanan berbasis elektronik juga mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses layanan tanpa harus datang secara langsung ke kantor pelayanan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel sepanjang tahun 2025.

Dengan dukungan sistem pelayanan digital tersebut, kinerja pelayanan perizinan di DPMPSTSP Kabupaten Polewali Mandar diharapkan semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DAN KEUANGAN

Secara keseluruhan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar di Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan menunjukkan komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab serta pencapaian realisasi indikator kinerja cukup sangat baik dengan persentase capaian 100 persen..

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Akuntabilitas ini disusun berdasarkan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan berorientasi pada hasil.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja utama (IKU) serta indikator kinerja kegiatan (IKK). Evaluasi capaian kinerja mengacu pada sistem akuntabilitas yang berlaku, seperti yang diatur dalam Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perbandingan Capaian Kinerja antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran untuk Tahun 2025 ini, dapat dilihat dari tabel dan diagram batang di bawah ini:

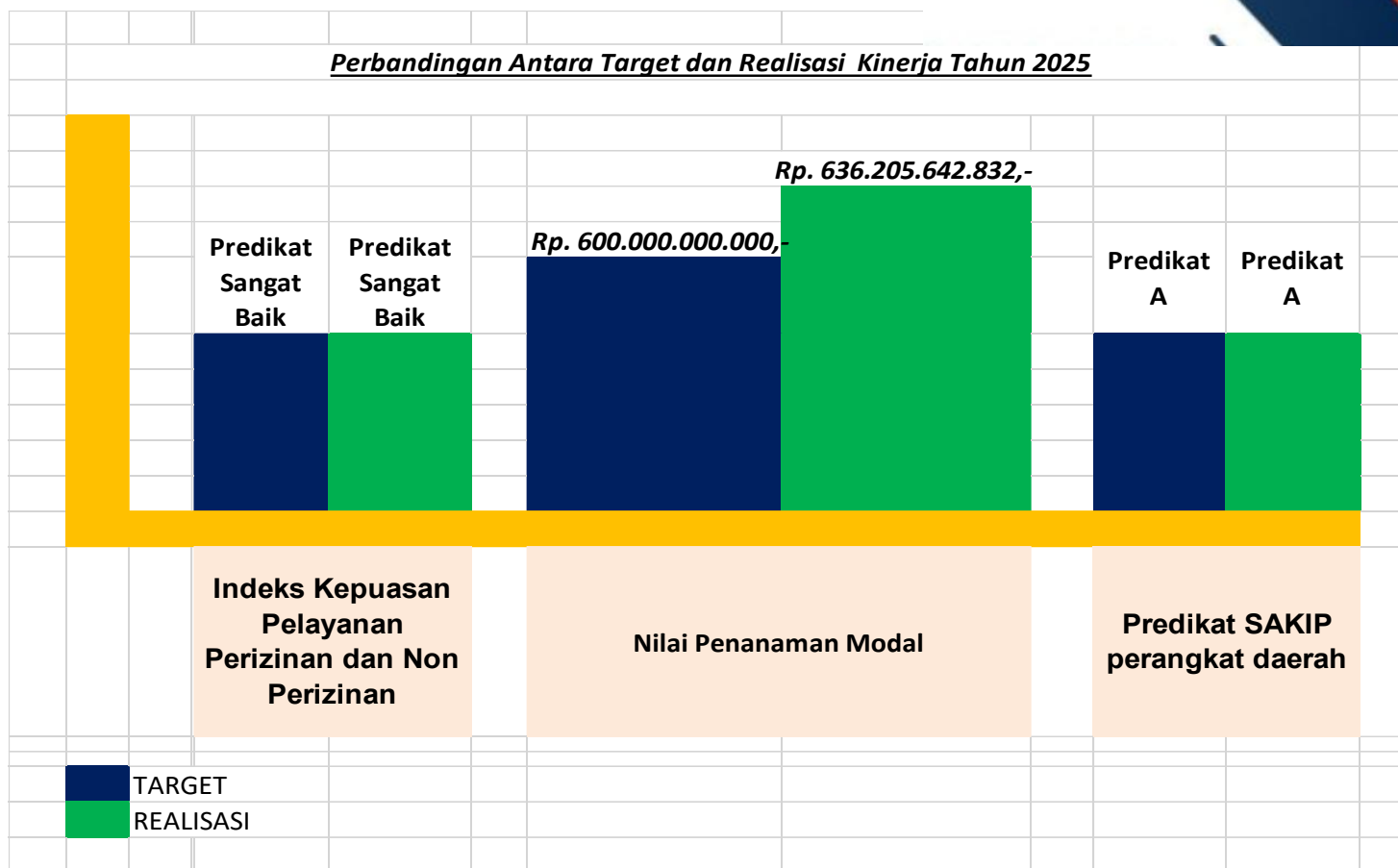
Tabel 17 :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	CAPAIAN TARGET KINERJA	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1 Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Predikat Sangat Baik	Predikat Sangat Baik	100%
2	Meningkatnya kualitas penanaman modal	1 Nilai Penanaman Modal	Rp. 600.000.000.000,-	Rp. 636.205.642.832,-	106%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Predikat SAKIP	Predikat A	Predikat A	100%

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dari indikator kinerja sasaran dapat terealisasi sangat baik dimana Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tersebut berjalan sesuai pelaksanaan yang tepat waktu. Bahkan ada Indikator Kinerja Sasaran yang melampau Target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar Diagram batang dibawah ini :

Gambar 8 : Diagram Batang Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025.



Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebagian besar indikator kinerja tahun 2025 telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan.
- Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menunjukkan kinerja sangat baik karena realisasi tercapai.
- Indikator Nilai Penanaman Modal menunjukkan kinerja sangat baik karena kategori melampaui target.
- Indikator Predikat SAKIP menunjukkan kinerja sangat baik karena realisasi tercapai.

Secara keseluruhan, perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja tahun 2025 menunjukkan tren positif dan mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel, efektif, dan berorientasi hasil.

SASARAN STRATEGIS 1

**Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan**

INDIKATOR KINERJA :

**Indeks Kepuasan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan**

TARGET TAHUN 2025 :

PREDIKAT SANGAT BAIK

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **mencapai target** yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahunan. Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, di gambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 18 :

Target dan Realisasi Tahun 2025 Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

NO	SASARAN STRATEGIS	NDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	CAPAIAN TARGET KINERJA	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1 Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Predikat Sangat Baik	Predikat Sangat Baik	100 %

Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2025:

- **Target IKM Tahun 2025:** Predikat sangat Baik
- **Realisasi IKM Tahun 2025:** Predikat sangat Baik
- **Persentase Capaian:** 100%
- **Kategori:** Tercapai Target

Dengan realisasi tercapai, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan telah berjalan dengan baik sesuai standar pelayanan yang berlaku.

Perbandingan dengan capaian kinerja 2025 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan hasil capaian kinerja 2025 Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan tahun lalu dan tahun tahun sebelumnya dilakukan untuk melihat tren peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan serta efektivitas perbaikan layanan dari tahun ke tahun, sebagaimana di gambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 18 :

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022-2025

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

TAHUN.	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI
2022	Predikat Sangat Baik	Predikat Sangat Baik	100 %	Tercapai
2023	Predikat Sangat Baik	Predikat Sangat Baik	100%	Tercapai
2024	Predikat Sangat Baik	Predikat Sangat Baik	100 [^]	Tercapai
2025	Predikat Sangat Baik	Predikat Sangat Baik	100 [^]	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Terjadi **tren peningkatan nilai indeks secara konsisten** dari tahun 2022 hingga 2025.

- Sejak 2022 hingga 2025 capaian selalu memenuhi capaian target.
- Nilai realisasi tahun 2025 merupakan capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir.
- Pencapaian target ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem pelayanan perizinan dan non perizinan.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan antara lain:

- Digitalisasi dan integrasi sistem pelayanan
- Penyederhanaan prosedur dan waktu pelayanan
- Peningkatan kompetensi dan profesionalisme petugas layanan
- Peningkatan sarana prasarana pelayanan
- Tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat secara berkala

Secara keseluruhan, capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menunjukkan **tren positif dan berkelanjutan**, yang mencerminkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan antara lain sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan petugas

Profesionalitas, kompetensi, serta sikap ramah dan responsif dari petugas pelayanan sangat mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dalam proses pengurusan perizinan maupun non perizinan.

2. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan

Kemampuan unit pelayanan dalam menyelesaikan permohonan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan memberikan kontribusi besar terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan.

3. Kemudahan prosedur dan persyaratan layanan

Prosedur yang sederhana, persyaratan yang jelas, serta alur pelayanan yang mudah dipahami masyarakat membantu meningkatkan persepsi positif terhadap layanan.

4. **Pemanfaatan sistem pelayanan berbasis digital**

Penggunaan sistem layanan perizinan secara elektronik mempermudah proses pengajuan, pemantauan, dan penyelesaian permohonan sehingga meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan.

5. **Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan**

Fasilitas ruang pelayanan yang memadai, akses informasi yang jelas, serta sarana pendukung lainnya turut mempengaruhi kenyamanan dan kepuasan masyarakat.

6. **Penanganan pengaduan dan umpan balik masyarakat**

Mekanisme pengaduan yang responsif serta tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan kepuasan layanan.

Secara umum, capaian indeks kepuasan dipengaruhi oleh kemampuan penyelenggara layanan dalam memberikan pelayanan yang **cepat, transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.**

Keberhasilan serta Solusi yang dilakukan Pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menunjukkan capaian yang baik dan konsisten meningkat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai strategi perbaikan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Keberhasilan yang dicapai

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan hasil dari komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip pelayanan publik yang transparan, efektif, dan responsif. Beberapa bentuk keberhasilan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

a. Peningkatan Nilai Indeks Secara Konsisten

Terjadi peningkatan nilai indeks dari tahun ke tahun hingga melampaui target pada tahun terakhir, yang mencerminkan meningkatnya persepsi positif masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

b. Penyederhanaan Proses Layanan

Prosedur pelayanan menjadi lebih ringkas, jelas, dan terstandar sehingga waktu penyelesaian izin lebih cepat dan transparan.

c. Digitalisasi Layanan

Optimalisasi sistem pelayanan berbasis elektronik, termasuk integrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS), membantu mempercepat proses perizinan dan memudahkan pemohon dalam mengakses layanan.

d. Peningkatan Profesionalisme SDM

Petugas layanan memberikan layanan secara profesionalisme dengan cara mengarahkan pemohon izin sesuai dengan standar pelayanann.

e. Penguatan Sistem Pengaduan

Tersedianya kanal pengaduan yang mudah diakses memungkinkan masyarakat menyampaikan masukan, kritik, dan saran sebagai bahan evaluasi.

Solusi dan Upaya Perbaikan yang dilakukan

Solusi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pencapaian target angka indeks, tetapi juga pada perbaikan sistem pelayanan secara menyeluruh. Ke depan, inovasi layanan, penguatan digitalisasi, serta peningkatan kualitas SDM perlu terus dilakukan agar kepuasan masyarakat dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Untuk mengatasi kendala dan mempertahankan capaian indeks, berbagai solusi telah diterapkan, antara lain:

a. Evaluasi Berkala Berbasis Survei

Hasil survei kepuasan masyarakat dianalisis secara periodik untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu diperbaiki.

b. Standarisasi dan Monitoring Layanan

Penerapan standar pelayanan yang jelas serta monitoring kinerja petugas secara rutin guna memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

c. Optimalisasi Teknologi Informasi

Pengembangan fitur layanan online, melalui aplikasi OSS

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perbaikan ruang pelayanan, fasilitas pendukung, serta kenyamanan pengguna layanan.

e. Peningkatan Koordinasi Lintas Tim Teknis Perizinan

Penguatan koordinasi antarbidang untuk mempercepat proses verifikasi dan penerbitan perizinan.

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.


Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang dirancang secara terarah, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut analisis program dan kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap capaian indikator tersebut.

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal melalui penyederhanaan proses perizinan, peningkatan transparansi, serta percepatan realisasi investasi. Program ini berperan penting dalam mendukung iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepuasan pelaku usaha.

Kegiatan Pendukung:

- Penyusunan dan pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Penetapan dan evaluasi Standar Pelayanan
- Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala
- Monitoring dan evaluasi kinerja layanan
- Pelayanan Mobile Perizinan
- Pelaksanaan Penetapan dan Peninjauan Perizinan
- Pelayanan Pengaduan
- Pelayanan perizinan berbasis elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS)
-



Keberhasilan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan hasil sinergi berbagai program strategis yang saling mendukung. Pada Program Pelayanan Penanaman Modal terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepuasan pelayanan perizinan terhadap masyarakat.

Adapun Sub Kegiatan yang mendukung Program Pelayanan Penanaman Modal yaitu :

1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.

Sub kegiatan ini adalah proses penyediaan layanan penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS berbasis risiko, sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha (rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi).

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Sub kegiatan ini merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dan pelaksanaan pemberian fasilitas atau insentif kepada pelaku usaha/investor di daerah.

3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

Sub kegiatan ini merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berfokus pada pengawasan administratif dan kinerja penyelenggaraan perizinan berusaha melalui sistem elektronik berbasis risiko.

Analisis Efisiensi, Sumber Daya (Anggaran) Pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Analisis efisiensi dan penggunaan sumber daya (anggaran) pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (IKM), adalah sebagai berikut :

Analisis Efisiensi Anggaran :

Tabel 20 :

**Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025 pada Program
Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.**

NO.	PROGRAM	PAGU	PAGU	JUMLAH	PERSENTASE
		ANGGARAN POKOK	ANGGARAN SETELAH REFOCUSING	EFISIENSI ANGGARAN	EFISIENSI ANGGARAN
1	Pelayanan Penanaman Modal	90.000.800	43.724.080	46.276.720	49 %

Berdasarkan Tabel diatas bahwa efisiensi Anggaran pada indikator ini mencapai 49 Persen sehingga secara umum terjadi **penghematan anggaran sebesar 49%** dari total pagu yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja.

Artinya, hanya sekitar **51% anggaran yang digunakan**, sementara target kinerja tetap tercapai dimana Program dinilai **sangat efisien**., Output tercapai dengan biaya jauh lebih rendah dari yang direncanakan. Dan Ada optimalisasi sumber daya

Persentase efisiensi anggaran sebesar 49% menunjukkan adanya penghematan belanja dalam pelaksanaan program pelayanan perizinan dan non perizinan. Capaian ini mengindikasikan optimalisasi penggunaan sumber daya, di mana target kinerja tetap dapat dicapai dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu yang ditetapkan.

Efisiensi anggaran hingga 49% mencerminkan penerapan prinsip *value for money*, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya sehingga kegiatan tetap terlaksana sesuai target dengan kualitas output dan outcome yang terjaga. Penghematan ini merupakan hasil pengendalian biaya dan perencanaan yang lebih efektif, bukan menunjukkan ketidakmampuan dalam menyerap anggaran.

Efisiensi hingga 49% menunjukkan optimalisasi sumber daya sesuai prinsip *value for money*, di mana kegiatan tetap mencapai target dengan kualitas output dan outcome yang terjaga. Penghematan terjadi melalui pengendalian biaya yang lebih efektif, bukan karena rendahnya penyerapan anggaran.

AYO !!! Warga Polewali Mandar
DAFTARKAN PERIZINAN BERUSAHA GRATIS...
KAMI SIAP MEMBANTU ANDA

PERSYARATAN MEMBUAT NIB :

- FOTO COPY KTP
- FOTO COPY NPWP (Jika Memiliki)
- ALAMAT EMAIL AKTIF
- NOMOR WHATSHAPP AKTIF

NIB ADALAH NOMOR INDUK BERUSAHA SEBAGAI IDENTITAS PELAKU USAHA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN BERUSAHA

Dpmptsp@polmankab.go.id | [Dpmptsp Polmankab](https://www.facebook.com/DpmptspPolmankab) | [dpmptsp_polmankab](https://www.instagram.com/dpmptsp_polmankab)

Gambar 9 : Penyampaian Pelayanan Perizinan Berusaha

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Adapun Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

- Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Tahapan dalam Menyusun survei indeks kepuasan masyarakat ,

TAHAPAN PENYUSUNAN SURVEI IKM	
1	Pengumpulan Data Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Hasil Pengolahan Data IKM
3	Analisis Hasil SKM

TAHAPAN 1

Pengumpulan Data Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

• **Metode Pengumpulan Data**

Pelaksanaan SKM menggunakan iPad kepada pengguna layanan yang terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu yaitu :

- **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

- **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Populasi seluruh masyarakat yang di jadikan Sample sebanyak 870 Responden

- **Lokasi Pengumpulan Data**

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di loket penyerahan izin pada ruang pelayanan DPMPTSP pada waktu jam layanan sedang berlangsung atau jam kerja layanan

- **Waktu Pelaksanaan SKM**

Berdasarkan jadwal yang ditentukan, survey kepuasan masyarakat dilaksanakan mulai tanggal 04 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 di Kantor DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lama Waktu
1.	Persiapan	Januari 2024	2 Hari
2.	Pengumpulan Data	Januari-Desember 2024	12 Bulan
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Desember 2024	3 Hari
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Desember 2024	2 Hari

Hasil Pengolahan Data Indeks Kepuasan Masyarakat

• Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 725 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	223	30,8%
		PEREMPUAN	502	69,2%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	17	2,3%
		SMP	0	0%
		SMA	159	21,9%
		S1	420	57,9%
		S2	17	2,3%
		D3	82	11,3%
		D4	30	4,1%
3	JENIS LAYANAN	TASPEN	0	0
		KP2KP	0	0
		BAPENDA	0	0
		BPJS	0	0
		KETENAGAKERJAAN		
		TRANSMIGRASI (AK1)	0	0
		BPJS KESEHATAN	0	0
		SAMSAT	0	0
		KKPR	4	0,6%

	BALAI PELATIHAN KHUSUS	0	0
	IZIN TERAPIS GIGI DAN MULUT	0	0
	IZIN PAUD/TK	1	0,6%
	IZIN TOKO OBAT	0	0
	IZIN PERASIONAL RS	0	0
	IZIN KLINIK	0	0
	PRAKTEK RADIOGRAFER	4	0,6%
	IZIN PUSKESMAS	0	0
	IZIN PEREKAM MEDIS	9	1,2%
	IZIN PRAKTEK GIZI	4	0,6%
	IZIN TENAGA PENYEHAAT	9	1,2%
	IZIN ANASTESI	9	1,2%
	IZIN FISIOTERAPIS	4	0,6%
	IZIN SIKAK	0	0
	IZIN APOTEK	4	0,6%
	IZIN APOTEKER	26	3,6%
	IZIN PERAWAT	47	6,5%
	IZIN DOKTER	39	5,4%
	PDAM	4	0,6%
	IZIN PBG	4	0,6%
	IZIN OSS	26	3,6%
	IZIN BIDAN	34	4,7%
	IZIN PENELITIAN	494	68,1%

Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

Gambar 3:

Grafik Nilai SKM Per Unsur Tahun 2025

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
IKM Unit Layanan	100,0								
Mutu Unit Layanan	A (Sangat Baik)								

TAHAPAN 3

Analisis Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil olahan data dari Survei Kepuasan Menunjukkan bahwa setiap unsur dari 9 layanan yang disurvei mendapatkan nilai A (Sangat Baik) dari Masyarakat (Responden), Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbaikan layanan pada berbagai aspek sehingga mendapatkan apresiasi dengan nilai 100,0 dari range 1-100 (dengan nilai sempurna).

Nilai tersebut merupakan bentuk apresiasi dari kepuasan masyarakat atas layanan yang telah di berikan. Namun demikian, sebagai bentuk tanggung jawab moral maka kami tetap berkomitmen untuk tetap melakukan perbaikan pada semua aspek layanan.

Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan pada semua unsur hasilnya sebagai berikut :

Waktu Pelaksanaan							
No.	Unsur Prioritas	Program / Kegiatan	Penanggung Jawab				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Persyaratan	Rapat Monitoring dan Ewaluasi Sosial Media	√	√	√	√	Bidang Pelayanan DPMPTSP
2	Kemudahan Prosedur Layanan	Rapat Monitoring dan Evaluasi dengan Petugas Pelayanan	√	√	√	√	Bidang Pelayanan DPMPTSP
3	Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan	Rapat Monitoring dan Evaluasi dengan Petugas Pelayanan	√	√	√	√	Bidang Pelayanan DPMPTSP
4	Kompetensi/kemampuan Petugas Pelayanan	Rapat Monitoring dan Evaluasi dengan Petugas Pelayanan	√	√	√	√	Bidang Pelayanan DPMPTSP
5	Perilaku Pelaksana	Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 5S	√	√	√	√	Bidang Pelayanan DPMPTSP
6	Sarana dan Prasarana	Evaluasi Peningkatan Sarana dan Prasarana	√	√	√	√	Sekretariat DPMPTSP

7	Fasilitas Penanganan Pengaduan	Rapat Monitoring dan Evaluasi Petugas Pengaduan	√	√	√	√	Bidang Pelayanan DPMPTSP
---	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---------------------------------

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tahun 2023-2025

Tabel 21 : Tren Kinerja Pelayanan Perizinan (IKM)

Tren Kinerja Pelayanan

No	Tahun	Nilai IKM
1	2022	97,5
2	2023	98,2
3	2024	100,0
4	2025	100,0



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari Tahun 2022 hingga 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Gambar 10 : Pelayanan Perizinan

TINDAK LANJUT SKM TAHUN 2025

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindak lanjuti (Sudah/ Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut	Dokumentasi Kegiatan
1	Rapat Monitoring dan Evaluasi Sosial Media	Sudah	Mengadakan Rapat monitoring dan evaluasi dengan petugas pelayanan	Terlampir
2	Rapat Monitoring dan Evaluasi dengan Petugas Pelayanan	Sudah	Mengadakan Rapat monitoring dan evaluasi dengan petugas pelayanan	Terlampir
3	Rapat monitoring dan evaluasi dengan petugas pelayanan	Sudah	Mengadakan Rapat monitoring dan evaluasi dengan petugas pelayanan	Terlampir
4	Rapat Monitoring dan Evaluasi dengan Petugas Pelayanan	Sudah	Mengadakan Rapat monitoring dan evaluasi dengan petugas pelayanan	Terlampir
5	Rapat monitoring dan evaluasi pelaksana 5S	Sudah	Mengadakan rapat monitoring dan evaluasi terkait perilaku pelaksana petugas pelayanan	Terlampir
6	Evaluasi Peningkatan Sarana dan Prasarana	Sudah	Mengadakan Rapat monitoring bersama petugas pelayanan dan sekretariat terkait sarana dan prasarana.	Terlampir
7	Rapat Monitoring dan Evaluasi Petugas Pengaduan	Sudah	Mengadakan Rapat monitoring dan evaluasi dengan petugas pelayanan	Terlampir

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi

NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,11

per unsur

IKM UNIT PELAYANAN : 100,0

Mutu Pelayanan :

- A** (Sangat Baik) : 88,31-100,00
- B** (Baik) : 76,61-88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00-76,60
- D** (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

No.	UN	
U1	Persyaratan.	4,00
U2	Sistim, Mekanisme dan Prosedur	4,00
U3	Waktu Penyelesaian	4,00
U4	Biaya/Tarif	4,00
U5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	4,00
U6	Kompetensi pelaksana	4,00
U7	Perilaku Pelaksana	4,00

U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4,00
U9	Sarana dan Prasarana	4,00

Trend kinerja SKM mencapai 100% menunjukkan bahwa:

- Target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra/Perjanjian Kinerja) tercapai sepenuhnya.
- Tidak terdapat deviasi antara target dan realisasi.
- Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan mampu dipertahankan sesuai standar yang ditetapkan.

Trend kinerja Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada pelayanan perizinan dan non perizinan mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai sepenuhnya sesuai perencanaan. Capaian ini mencerminkan konsistensi kualitas pelayanan serta efektivitas pelaksanaan program pendukung layanan.

LAPORAN IZIN YANG DITERBITKAN

Tahun 2025

Pada Tahun 2025, pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara terpadu melalui sistem pelayanan berbasis elektronik guna meningkatkan transparansi, kecepatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Tabel. 2 :

Data Rekapitulasi Izin yang diterbitkan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

NO.	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	1
2	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	4
3	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Farfum Dan Kosmetik Di Toko	68
4	Aktivitas Kesehatan Manusia (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Optikal Dan Izin Unit Transfusi Darah)	17
5	Izin Praktek Dokter Umum	27
6	Izin Praktek Dokter	129
7	Izin Praktek Dokter Gigi	2
8	Izin Praktek Dokter Spesialis	9

9	Izin Praktik Perawat	183
10	Izin Praktik Bidan	177
11	Izin Praktik Apoteker	35
12	Izin Praktik Tenaga Tekhnis Kefarmasian	35
13	Izin Praktek Tenaga Gizi	9
14	Izin Praktik Fisioterafis	8
15	Izin Praktik Radiografer	7
16	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	22
17	Izin Praktik Perekaman Medis	5
18	Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut	6
19	Izin Praktik Penata Anestesi	1
20	Promosi Kesehatan	2
21	Psikolog Klinis	1
22	Izin Praktik Tenaga Sanitarian	1
23	Industri Makanan	1270
24	Industri Minuman	137
25	Industri Pengolahan Tembakau	2
26	Industri Tekstil	36
27	Industri Pakaian Jadi	103
28	Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya	33
29	Industri Percetakan Dan Reproduksi Media Rekaman	14
30	Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	15

31	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	5
32	Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik	4
33	Industri Barang Galian Bukan Logam	81
34	Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya	56
35	Industri Komputer, Barang Elektronik Dan Optik	2
36	Industri Mesin Dan Perlengkapan Ytdl	13
37	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer	1
38	Industri Alat Angkutan Lainnya	1
39	Industri Furnitur	45
40	Industri Pengolahan Lainnya	14
41	Reparasi Dan Pemasangan Mesin Dan Peralatan	7
42	Produksi Es	27
43	Produksi Kompos Sampah Organik	2
44	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	80
45	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	3
46	Aktivitas Penerbitan Lainnya	4
47	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	12
48	Aktivitas Pengolahan Data	11
49	Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri	1
50	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga Dan Permainan	3
51	Aktivitas Pengepakan	1
52	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	10

53	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	67
54	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	223
55	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	1485
56	Pergudangan Dan Penyimpanan	5
57	Telekomunikasi	26
58	Aktivitas Jasa Infomasi	8
59	Pedagang Berjangka	1
60	Periklanan Dan Penelitian Pasar	1
61	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi	53
62	Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan	7
63	Aktivitas Adminstrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya	15
64	Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkaoan Rumah Tangga	15
65	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	43
66	Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum	3
67	Konstruksi Gedung	121
68	Kontruksi Bangunan Sipil	91
69	Konstruksi Khusus	28
70	Real Estat	1
71	Aktivitas Arsitektur	6
72	Aktivitas Desain Interior	1
73	Restoran	1
74	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	5

75	Pertambangan Batu Bara Dan Lignit	1
76	Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam Dan Panas Bumi	1
77	Pertambangan Biji Logam	1
78	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	15
79	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	2
80	Transmisi Tenaga Listrik	4
81	Instalasi Listrik	6
82	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	7
83	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	138
84	Penyimpanan Minyak Dan Gas Bum	3
85	Jasa Pengujian Laboratorium	1
86	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan Kegiatan Ydbi	479
87	Industri Kopra, Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	74
88	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Untuk Hewan	8
89	Pengumpulan, Treatment Dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material	3
90	Usaha Kehutanan Lainnya	3
91	Industri Penggergajian Kayu	1
92	Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa	23
93	Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan	2
94	Pendidikan Lainnya Swasta	1
95	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl	2
96	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	9

97	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl	3
98	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl	2
99	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (Pkkpr)	7
100	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha (Pkkpr)	36
101	Aktivitas Keamanan Swasta	1
102	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	7
103	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	193
104	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	1
105	Tanda Daftar Gudang (TDG) OSS	5
106	Pencabutan Izin Praktik Dokter	40
107	Pencabutan Izin Praktik Apoteker	10
108	Pencabutan Izin Praktik Bidan	25
109	Pencabutan Izin Praktik Perawat	15
110	Pencabutan Izin Praktik Fisioterapis	1
111	Pencabutan Izin Praktik Tenaga Tekhnis Kefarmasian	4
112	Pencabutan Izin Praktik ATLM	2
113	Pencabutan Izin Praktik Perekam Medik	1
114	Pencabutan Izin Praktik Radiografer	1
115	Pencabutan Izin Apotek	3

116	Izin Usaha Daya Tarik Wisata, Izin Usaha Kawasan Pariwisata, Izin Usaha Jasa Transportasi, Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata, Izin Usaha Jasa Makan Minum, Izin Usaha Penyediaan Akomodasi, Izin Usaha Penyelenggara Hiburan Dan Rekreasi, Izin Usaha Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Izin Usaha Wisata Tirta, Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Izin Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata, Izin Usaha Jasa Pramuwisata, Izin Usaha Jasa Spa, Izin Perpanjangan Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh (Oss- Rba)	478
117	Izin Operasional Pendirian Tk/Paud/Kb (Pendidikan Usia Dini/ Kelompok Bermain)	4
118	Izin Operasional Pendirian LKP (Lembaga Kursus Dan Pelatihan)	1
119	Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Formal	1
120	Izin Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan (SSs- RBA)	18
121	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (Bkk)	2
122	Kartu Pencari Kerja	1020
123	Izin Sektor Ketenaga Kerjaan (OSS-RBA)	44
124	Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	1
125	Izin Penelitian	1025
126	Izin Usaha Perikanan Budidaya, Peringanan Tangkap, Pengolahan Ikan Dan Pemasaran Ikan (OSS-RBA)	106
127	Izin Usaha Aktivitas Penerbitan, Izin Usaha Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Vidio Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik, Izin Usaha Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman, Izin Usaha Telekomunikasi, Izin Usaha Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi, Izin Usaha Aktivitas Jasa Informasi (OSS-RBA)	22
JUMLAH		8811

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar, 2025

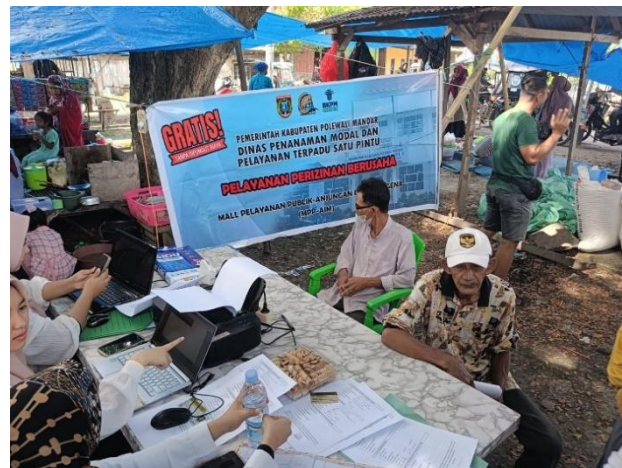
Pada Tahun 2025, jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 8.811 izin.

Jumlah tersebut mencerminkan tingginya aktivitas pelayanan perizinan dan menunjukkan bahwa sistem pelayanan berjalan secara aktif dan responsifPa terhadap kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha.

PELAYANAN MOBILE PERIZINAN

Tahun 2025

Pelayanan Mobile Perizinan merupakan inovasi pelayanan jemput bola yang dilaksanakan untuk mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat, khususnya di wilayah kecamatan/desa yang memiliki keterbatasan akses terhadap kantor pelayanan.



Gambar 11 : Pelayanan Mobile Perizinan

Program ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan kemudahan akses layanan
- Mempercepat proses perizinan
- Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Mendorong pertumbuhan UMKM dan investasi daerah

Pada Tahun 2025, kegiatan Pelayanan Mobile Perizinan dilaksanakan di beberapa kecamatan dengan layanan meliputi:

- Pendaftaran dan konsultasi perizinan usaha
- Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Perizinan UMKM
- Layanan non perizinan tertentu
- Pendampingan penggunaan sistem perizinan elektronik

dukungan perangkat teknologi dan petugas teknis.

Capaian Kinerja Pelayanan Mobile Perizinan di Tahun 2025 telah melakukan kegiatan di lokasi Pasar Sentral Pekkabata, Kecamatan Polewali, Pasar Campalagian, Pasar Tinambung dan Pasar Wonomulyo.

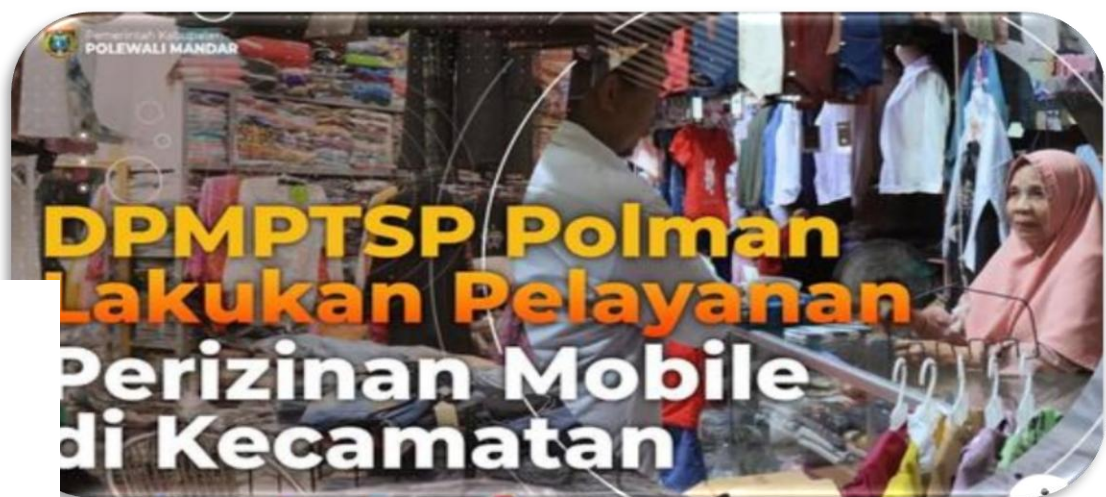
Pelayanan Mobile Perizinan memberikan dampak sebagai berikut:

- ✓ Meningkatkan jumlah izin yang diterbitkan
- ✓ Mengurangi biaya dan waktu masyarakat
- ✓ Meningkatkan literasi digital pelaku usaha
- ✓ Mendorong pemerataan pelayanan hingga wilayah terpencil

Kegiatan juga berkontribusi terhadap capaian jumlah izin tahun 2025 serta mendukung tren SKM yang mencapai 100%.



Pelayanan Mobile Perizinan Tahun 2025 berjalan efektif sebagai strategi peningkatan kualitas pelayanan publik. Program ini memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan inklusif.



PELAYANAN MPP

(Mal Pelayanan Publik)

Tahun 2025

Pelayanan melalui **Mal Pelayanan Publik (MPP)** merupakan integrasi berbagai jenis layanan perizinan dan non perizinan dalam satu lokasi pelayanan terpadu. MPP bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat. Pada Tahun 2025, pelayanan MPP difokuskan pada:

- Pelayanan perizinan berusaha
- Pelayanan perizinan non berusaha
- Layanan administrasi lintas instansi
- Konsultasi dan pendampingan perizinan

Capaian Pelayanan MPP Tahun 2025 Menunjukkan ::

- Peningkatan jumlah kunjungan masyarakat
- Tingginya jumlah izin yang diproses dan diterbitkan
- Waktu pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP)
- Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi (SKM mencapai 100%)



MPP berkontribusi terhadap total penerbitan izin sebanyak 8.811 izin pada tahun 2025.

Manfaat Pelayanan MPP

- ✓ Integrasi layanan dalam satu tempat (one stop service)
- ✓ Efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat
- ✓ Transparansi proses dan biaya layanan

- ✓ Meningkatkan iklim investasi daerah
- ✓ Mendukung transformasi pelayanan berbasis digital

Pelayanan MPP Tahun 2025 berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Polewali Mandar. Integrasi layanan dalam satu tempat menjadi faktor utama dalam peningkatan kepuasan masyarakat dan efektivitas pelayanan perizinan.



Gambar 12 : Pelayanan MPP

KONDISI LAYANAN

131
LAYANAN
PERIZINAN/
NON
NAN

17
GERAI



- BPJS KESEHATAN
- BPJS KETENAGAKERJAAN
- BPOM
- UPTD SAMSAT
- POLRES
- KEMENTERIAN AGAMA
- KEJAKSAAN NEGERI
- PENGADILAN NEGERI
- PDAM
- KANTOR PAJAK PRATAMA
- BNN
- TASPEN
- DINAS SOSIAL
- DINAS DUKCAPIL
- DINAS TRANSNAKER
- BADAN PENDAPATAN
- BANK SULSELBAR

KEGIATAN PENINJAUAN PERIZINAN

Tahun 2025

Kegiatan Peninjauan Perizinan merupakan bagian dari fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang telah diterbitkan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan dengan kondisi riil di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan
- Memastikan kesesuaian lokasi, jenis usaha, dan operasional
- Mencegah pelanggaran administrasi dan teknis
- Meningkatkan kualitas tata kelola perizinan

Pada Tahun 2025, peninjauan perizinan dilakukan melalui:

- Verifikasi lapangan terhadap permohonan izin tertentu
- Monitoring usaha yang telah beroperasi
- Klarifikasi atas laporan/pengaduan masyarakat
- Koordinasi teknis dengan OPD terkait

Peninjauan dilaksanakan secara berkala maupun insidental sesuai kebutuhan dan tingkat risiko usaha.

Secara umum, hasil peninjauan menunjukkan:

- Mayoritas pelaku usaha telah memenuhi ketentuan izin
- Ditemukan beberapa ketidaksesuaian administrasi yang telah diberikan pembinaan



- Tidak ditemukan pelanggaran berat yang berdampak signifikan terhadap pencabutan izin.

Kegiatan peninjauan perizinan berkontribusi terhadap:

- ✓ Peningkatan kepatuhan pelaku usaha
- ✓ Menjaga kualitas pelayanan perizinan
- ✓ Meningkatkan kepercayaan masyarakat
- ✓ Mendukung capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)



Kegiatan Peninjauan Perizinan Tahun 2025 berjalan dengan baik dan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa izin yang diterbitkan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan. Kegiatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga iklim investasi dan ketertiban usaha di Kabupaten Polewali Mandar.

Gambar 13 : Kegiatan Peninjauan Perizinan

dpmptsp.polmankab.go.id

[PROFIL ORGANISASI](#)
[INFORMASI LAYANAN](#)
[INFORMASI KINERJA](#)
[REGULASI](#)
[BERITA](#)



LEGALKAN USAHA ANDA DENGAN
NOMOR INDUK BERUSAHA

Buat **NIB** sekarang juga melalui
 Online Single Submission (OSS)
 dan aplikasi OSS Indonesia versi 2.0
 yang dapat diunduh di Play Store atau App Store

[Klik Disini](#)
[klik di sini](#)

TOTAL 295 RDTR
 Untuk berinvestasi di sektor RDTR

Cara Mengunduh
 Aplikasi OSS

Cara Menambah
 Bilangan Usaha

f
 Instagram
 Twitter
 YouTube

SASARAN STRATEGIS 2

**Meningkatnya kualitas
penanaman modal**

INDIKATOR KINERJA :

Nilai Penanaman Modal

TARGET TAHUN 2025 :

Rp. 600.000.000.000

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja Nilai Penanaman Modal

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Nilai Penanaman Modal Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **mencapai melebihi target** yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahunan. Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas Penanaman Modal yang sangat responsif, transparan, dan berorientasi pada kpeningkatan nilai investasi daerah, di gambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 22 :
Target dan Realisasi Tahun 2025
Indikator Kinerja Nilai Penanaman Modal

NO	SASARAN STRATEGIS	NDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	CAPAIAN TARGET KINERJA	%
1	Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal	1 Nilai Penanaman Modal	Rp. 600.000.000.000	Rp. 636.205.642.832,-	106 %

Berikut perhitungan dan analisis capaian kinerja untuk
Indikator Kinerja: Nilai Penanaman Modal Tahun 2025:

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Uraian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai Penanaman Modal	Rp 600.000.000.000	Rp 636.205.642.832	106,03%	Sangat Baik

Analisis Kinerja

Realisasi Nilai Penanaman Modal Tahun 2025 sebesar **Rp 636.205.642.832** atau **106%** dari target Rp 600.000.000.000. Dengan demikian, capaian kinerja termasuk dalam kategori **Sangat Baik** karena melebihi target yang telah ditetapkan.

Peningkatan ini menunjukkan:

- Tingginya minat dan kepercayaan investor
- Efektivitas kebijakan promosi dan fasilitasi investasi
- Dukungan kemudahan perizinan dan pelayanan penanaman modal
- Stabilitas iklim usaha di daerah

Berdasarkan Tabel diatas target indikator kinerja Sasaran nilai Penanaman Modal ini mengalami kenaikan nilai realisasi investasi dari target yang ditentukan., tercapainya target indikator ini berkat dukungan dari para pelaku usaha untuk mendaftarkan investasi usahanya dan Para pelaku usaha atau perusahaan untuk melaporkan investasinya yang sesuai dengan hasil pemantauan dari tim Penanaman modal kabupaten polewali mandar yang terjun langsung memantau para pelaku usaha.

Untuk capaian jumlah Tenaga Kerja yang diserap pada Perusahaan yang terdaftar di LKPM untuk tahun 2025 sebanyak **13.343 tenaga kerja** dan jumlah Pelaku Usaha sebanyak **4139 Pelaku Usaha/Perusahaan**

Tabel 24 :
Data Jumlah Perusahaan dan Jumlah Penyerrapan Tenaga Kerja di Perusahaan Tahun 2025

NO.	BULAN	DATA JUMLAH PERUSAHAAN TAHUN 2025	DATA JUMLAH PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN TAHUN 2025
1	JANUARI	444	1.241
2	FEBRUARI	428	1.094
3	MARET	265	629
4	APRIL	345	924
5	MEI	463	1.442
6	JUNI	356	1.198
7	JULI	422	1.878
8	AGUSTUS	379	1.069
9	SEPTEMBER	482	2.159
10	OKTOBER	306	951
11	NOVEMBER	123	360
12	DESEMBER	126	398
JUMLAH		4139	13.343

Perbandingan dengan capaian kinerja 2025 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya Indikator Kinerja Nilai Penanaman Modal

Perbandingan hasil capaian kinerja 2025 Indikator Kinerja nilai Penanaman Modal dengan tahun lalu dan tahun tahun sebelumnya dilakukan untuk melihat tren peningkatan kualitas Penanaman Modal secara berkelanjutan serta efektivitas perbaikan Nilai Investasi dari tahun ke tahun, sebagaimana di gambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 25 :

**Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022-2025
Indikator Kinerja Nilai Penanaman Modal**

TAHUN.	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI
2022	118.450.000.000	186.523.356.799	157 %	Melebihi Target
2023	140.750.000.000	651.234.944.128	463%	Melebihi Target
2024	165.150.000.000	656.632.116.292	398%	Melebihi Target
2025	600.000.000.000	636.205.642.832	106%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Terjadi **tren peningkatan nilai investasi** dari tahun 2022 hingga 2025. Berdasarkan target capaian.
- Sejak 2022 hingga 2025 capaian selalu memenuhi capaian target.
- Pencapaian target ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem pelayanan perizinan dan non perizinan.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan capaian kinerja Nilai Penanaman Modal antara lain:

- Penyederhanaan Perizinan Berusaha
- Penerapan system perizinan berbasis risiko melalui OSS
- Kemudahan Pelayanan Perizinan
- Pertumbuhan ekonomi yang positif
- Kegiatan promosi investasi
- Meningkatnya realisasi investasi

Secara keseluruhan, capaian Indeks Penanaman Modal menunjukkan tren positif dan berkelanjutan. yang mencerminkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas Nilai Investasi di daerah.

Keberhasilan serta Solusi yang dilakukan Pada Indikator Kinerja Nilai Penanaman Modal.

Indikator Kinerja Nilai Penanaman Modal menunjukkan capaian yang baik dan konsisten meningkat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai strategi perbaikan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Keberhasilan yang dicapai

Keberhasilan pencapaian Nilai Penanaman Modal merupakan hasil dari komitmen organisasi dalam menerapkan peningkatan nilai investasi. Beberapa bentuk keberhasilan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

a. Peningkatan Realisasi Investasi

Terjadi kenaikan nilai Penanaman Modal (PMA dan PMDN) dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan meningkatnya minat dan kepercayaan investor.

b. Percepatan Perizinan Berusaha

Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) mempercepat proses penerbitan perizinan dan meningkatkan kemudahan berusaha.

c. Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif

Adanya fasilitasi pendampingan palaporan LKPM pada para pelaku usaha/perusahaan untuk berkontribusi untuk meningkatkan investasi di daerah.

d. Meningkatnya investasi

Fokus pada sektor unggulan/strategis yang memberikan dampak peningkatan investasi. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Nilai Investasi tidak terlepas dari sinergi kebijakan, kemudahan perizinan, serta dukungan infrastruktur dan promosi investasi yang berkelanjutan. Upaya perbaikan layanan dan penguatan koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama dalam menjaga tren peningkatan investasi.

Solusi dan Upaya Perbaikan yang dilakukan

Solusi yang dilakukan untuk peningkatan nilai investasi secara konsisten dan menyeluruh terhadap aspek-aspek yang dianggap berkontribusi pada peningkatan nilai investasi di daerah. Ke depan, kegiatan promosi penanaman modal dan pengawasan penanaman modal terus dilakukan untuk dapat meningkatkan nilai investasi dan mencapai target investasi yang cukup baik dan signifikan. Adapun yang telah diterapkan, antara lain:

a. Penyederhanaan kemudahan Perizinan

Optimalisasi layanan perizinan berbasis risiko. Dan Digitalisasi Perizinan

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi

Pelayanan terpadu satu pintu yang responsif dan menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

c. Promosi dan Fasilitasi Investasi

Fasilitasi investasi terhadap para pelaku usaha

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pada Indikator Kinerja Nilai Penanaman Modal.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Nilai Penanaman Modal tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang dirancang secara terarah, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas peningkatan investasi. Berikut analisis program dan kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap capaian indikator tersebut.

Program dan Kegiatan Pendukung

A. Program Promosi Penanaman Modal

1. Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal,

Kegiatan Promosi penanaman modal merupakan kegiatan strategis untuk menarik minat dan merealisasikan investasi melalui penyediaan informasi peluang usaha, data potensi investasi. Dengan kegiatan Penyusun Data potensi investasi daerah dan melakukan kegiatan penyebaran informasi promosi penanaman modal di daerah. Dan kontribusinya bisa meningkatkan minat investor dan memperjelas peluang investasi.

B. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Pengawasan Penanaman Modal

Pengawasan penanaman modal adalah rangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa investasi dilaksanakan sesuai izin, komitmen, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan berkontribusi dalam peningkatan nilai investasi di daerah.

Analisis Keterkaitan Program dengan Peningkatan Nilai Investasi

Program	Dampak Jangka Pendek	Dampak Jangka Panjang
Promosi Penanaman Modal	Komitmen investasi	Realisasi investasi
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Optimalisasi realisasi investasi	Data Pelaporan LKPM akurat & berkelanjutan

Keberhasilan indikator **Nilai Penanaman Modal** sangat ditentukan oleh sinergi antara:

- Promosi yang tepat sasaran
- Pelayanan perizinan yang cepat dan transparan
- Pengawasan dan fasilitasi yang responsif

Keberhasilan Indikator Kinerja Nilai Penanaman Modal merupakan hasil sinergi berbagai program strategis yang saling mendukung. Pada Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan nilai investasi di daerah..

Adapun Sub Kegiatan yang mendukung Program Pelayanan Penanaman Modal yaitu :

1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini merupakan pelaksanaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten/kota merupakan fungsi strategis DPMPPTSP untuk meningkatkan realisasi investasi secara terukur dan berkelanjutan.

2. Pengawasan Penanaman Modal

Sub kegiatan ini merupakan Pengawasan penanaman modal adalah proses pembinaan, pemantauan, dan penegakan kepatuhan terhadap pelaksanaan

Analisis Efisiensi, Sumber Daya (Anggaran) Pada Indikator Kinerja Nilai Penanaman Modal


Analisis efisiensi dan penggunaan sumber daya (anggaran) pada indikator kinerja Nilai Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

Analisis Efisiensi Anggaran :

Tabel 26 :
**Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025 pada Program
Indikator Kinerja Nilap Penanaman Modal**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN POKOK	PAGU ANGGARAN SETELAH REFOCUSING	JUMLAH EFISIENSI ANGGARAN	PERSENTAS E EFISIENSI ANGGARAN
1	Promosi Penanaman Modal	165.000.320	10.181.060	(154.819.260)	94 %
2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	15.001.000	10.081.000	(4.920.000)	33 %
		180.001.320	20.262.060	(159.739.260)	89 %

Berdasarkan Tabel diatas bahwa efisiensi Anggaran pada indikator ini mencapai 89% Persen sehingga secara umum terjadi **penghematan anggaran sebesar 89%** dari total pagu yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja.



Artinya, hanya sekitar **11% anggaran yang digunakan**, sementara target kinerja tetap tercapai dimana Program dinilai **sangat efisien**., Output tercapai dengan biaya jauh lebih rendah dari yang direncanakan. Dan Ada optimalisasi sumber daya

Persentase efisiensi anggaran sebesar 89% menunjukkan adanya penghematan belanja dalam pelaksanaan program promosi penanaman modal dan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Capaian ini mengindikasikan optimalisasi penggunaan sumber daya, di mana target kinerja tetap dapat dicapai dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu yang ditetapkan.

KEGIATAN

PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Tahun 2025

Kegiatan pengawasan penanaman modal tahun 2025 difokuskan pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha, percepatan realisasi investasi, dan penguatan kualitas data investasi. Di Indonesia, pelaksanaannya mengacu pada kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko yang di laksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.

Kegiatan pengawasan tahun 2025 berkontribusi pada:

- ✓ Peningkatan akurasi data realisasi investasi
- ✓ Peningkatan pelaporan LKPM pada pelaku usaha
- ✓ Peningkatan kepercayaan investor

Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal terhadap Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) di kabupaten Polewali Mandar melalui beberapa tahapan antara lain :

1. Analisa dan Verifikasi data, profil dan informasi kegiatan Usaha dari pelaku usaha
2. Inspeksi Lapangan;
3. Evaluasi Penilaian kepatuhan Pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha.

Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal ini adalah untuk :

1. Meningkatkan Kualitas investasi dan berkelanjutan
2. Kegiatan ini juga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dalam proses perizinan dan pelaksanaan investasi
3. Meningkatkan kepercayaan investor terhadap lingkungan investasi yang terkendali dan transparan pada suatu wilayah.
4. Menjamin keadilan pengawasan terhadap investor.



Gambar 14 : Kegiatan Inspeksi Lapangan terhadap para Pelaku Usaha dalam rangka pengawasan penanaman modal

Pengawasan penanaman modal merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa investasi yang masuk dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan pengawasan yang efektif diharapkan dapat tercapai iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kegiatan ini mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam melakukan verifikasi terhadap administrasi dan fisik yang meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai penanaman modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terhadap fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, kewajiban kemitraan terkait pelaksanaan penanaman modal dan melakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha kepada para pelaku usaha.

KEGIATAN

PENDAMPINGAN PELAPORAN LKPM

Tahun 2025

Kegiatan pendampingan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Tahun 2025 oleh DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pembinaan penanaman .

Pendampingan LKPM diperlukan untuk: :



- ✓ Meningkatkan kepatuhan pelaporan
- ✓ Meningkatkan akurasi data realisasi investasi
- ✓ Mendukung pencapaian indikator Nilai Penanaman Modal daerah

Gambar 15 : Pendampingan Pelaporan LKPM pada Pelaku Usaha

Memberikan bimbingan teknis dan asistensi kepada pelaku usaha agar mampu menyampaikan LKPM secara tepat waktu dan benar.

Tujuan

1. Meningkatkan persentase kepatuhan pelaporan LKPM.
2. Mengurangi kesalahan pengisian data.
3. Mempercepat validasi realisasi investasi.
4. Mendorong peningkatan nilai investasi Kabupaten Polewali Mandar.

DATA POTENSI INVESTASI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Tahun 2025

Tabel 27 :

Data Potensi Investasi Kabupaten Polewali Mandar, tahun 2025

No.	Jenis Potensi	Satuan Ukur	Jumlah Potensi	Keterangan
I.	Sektor Pertanian			
1	Padi sawah	Per Kecamatan	15	Luas Areal 33.361,22 ha Luas Panen 31.134,09 ha Produksi 230.381,34 ton Produktifitas 6,98 ton/ha
2	Padi Ladang	Per Kecamatan	5	Luas Areal 3.131 ha Luas Panen 3.793 ha Produksi 15.022,79 Ton Produktifitas 3,96 Ton/ha
3	Kacang Kedelai	Per Kecamatan	13	Luas Areal 136,46 ha Luas Panen 124,96 ha Produksi 279,52 Ton Produktifitas 2,24 Ton/ha
II	Sektor Perkebunan			
1	Kakao	Per Kecamatan	16	Luas Areal 48.929,50 ha Produksi 36.563,18 Ton Produktifitas 878,40 Kg/ha Jumlah Petani 46.554 KK
2	Kelapa Dalam	Per Kecamatan	16	Luas Areal 20.477,04 ha Produksi 17.676,32 Ton Produktifitas 1.133,27 Kg/ha Jumlah Petani 25.097 KK
3	Kelapa Hibrida	Per Kecamatan	13	Luas Areal 2.665,15 ha Produksi 2.398,61 Ton Produktifitas 1.402,57

				Kg/ha
4	Kopi Robusta	Per Kecamatan	12	Jumlah Petani 2.001 KK
				Luas Areal 1.844,96 ha
				Produksi 678,32 Ton
				Produktifitas 773,87 Kg/ha
5	Kopi Arabika	Per Kecamatan	4	Jumlah Petani 2.650 KK
				Luas Areal 394,92 ha
				Produksi 128,34 Ton
				Produktifitas 857,87 Kg/ha
6	Kemiri	Per Kecamatan	14	Jumlah Petani 557 KK
				Luas Areal 7.055,02 ha
				Produksi 1.836,36 Ton
				Produktifitas 965,97 Kg/ha
III	Sektor Peternakan			
1	Ternak Besar			
	a. Sapi	Per Kecamatan	16	34.369 Ekor
2	Ternak Kecil			
	a. Kambing	Per Kecamatan	16	93.881 Ekor
3	Unggas			
	a. Ayam Kampung	Per Kecamatan	16	1.603.230 Ekor
	b. Ayam Ras Petelur	Per Kecamatan	13	108.145 Ekor
	c. Ayam Ras Pedaging	Per Kecamatan	12	605.612 Ekor
	d. Itik (Duck)	Per Kecamatan	16	55.000 Ekor
	e. Itik Manila	Per Kecamatan	16	13.500 Ekor
IV	Sektor Perikanan			
1	Perikanan Tangkap			
	a. Perikanan Laut	Per Kecamatan	7	28.798,80 Ton
2	Perikanan Budidaya			
	a. Budidaya Laut	Per Kecamatan	3	14.702,80 Ton
	b. Tambak	Per Kecamatan	7	17.696,97 Ton
	c. Kolam	Per Kecamatan	16	15.241,97 Ton
	d. Sawah	Per Kecamatan	11	181,19 Ton
V	Sektor Pariwisata			
1	a. Wisata Bahari	Destinasi	22	Destinasi wisata Gusung Toraja dikelola oleh Pemda Polman dan lainnya di kelola swasta
2	b. Wisata Alam	Destinasi	33	
3	c. Seni Budaya	Destinasi	6	
4	d. Wisata Religi	Destinasi	4	
JUMLAH			322	

SASARAN STRATEGIS 3

**Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah**

INDIKATOR KINERJA :

Predikat SAKIP

TARGET TAHUN 2025 :

Predikat A

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja Predikat SAKIP



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 09 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Serta berdasarkan Hasil evaluasi Perhitungan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar, itu memuat Aspek komponen yang dinilai adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Internal
5. Capaian Kinerja

Data Evaluasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar yang rincian berdasarkan **REVIU Penilaian LAKIP DPMPSTSP dari Inspektorat** untuk Penilaian LAKIP Tahun 2025 yang hasilnya di Nilai di Tahun 2024 menghasilkan hasil penilaian komponen SAKIP sebagai berikut {

Tabel 28:

Data Indikator Penilaian Predikat SAKIP Perangkat Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Berdasarkan Reviu Penilaian LAKIP dari Inspektorat di Tahun 2025.

No.	Komponen yang dinilai	Hasil REVIU LAKIP 2025 Yang Dinilai LAKIP Tahun 2024	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,50
2	Pengukuran Kinerja	30	23,70
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4	Evaluasi Internal	25	21,25
5	Capaian Kinerja	-	-
	Nilai Hasil Evaluasi	100	81,85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Berdasarkan Tabel diatas diatas target indikator kinerja nilai SAKIP Perangkat Daerah pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar** itu telah mencapai target dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar memperoleh Nilai 81,85 atau memperoleh Predikat “A”.



Perbandingan dengan capaian kinerja 2025 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya Indikator Predikat SAKIP

Perbandingan hasil capaian kinerja 2025 Indikator Kinerja Predikat SAKIP dengan tahun lalu dan tahun tahun sebelumnya dilakukan untuk melihat tren peningkatan kualitas SAKIP secara berkelanjutan serta efektivitas pelaporan Kinerja dari tahun ke tahun, sebagaimana di gambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 29 :

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022-2025
Indikator Kinerja Predikat SAKIP.

TAHUN.	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI
2021	Predikat A	Predikat A	100 %	Tercapai
2022	Predikat A	Predikat A	100%	Tercapai
2023	Predikat A	Predikat A	100%	Tercapai
2024	Predikat A	Predikat A	100%	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Terjadi **tren peningkatan pencapaian target secara konsisten** dari tahun 2021 hingga 2024, (Tahun 2024 masuk di Penilaian ditahun 2025)

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan capaian kinerja predikat **SAKIP** (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)** antara lain:

1. **Perencanaan yang Matang dan Terukur**

Penyusunan rencana strategis, rencana operasional, dan indikator kinerja yang jelas serta realistis membantu mempermudah evaluasi capaian kinerja.

2. **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Implementasi sistem digital untuk layanan perizinan dan pengelolaan data investasi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pelaporan kinerja.

3. **Peningkatan Kapasitas SDM**

Pelatihan, workshop, dan pembinaan kompetensi bagi pegawai membuat mereka lebih mampu menjalankan tugas sesuai standar SAKIP.

4. **Penguatan Pengendalian Internal**

Penerapan SOP, audit internal, dan monitoring rutin memastikan setiap proses sesuai regulasi dan target kinerja tercapai.

5. **Keterlibatan Pemangku Kepentingan**

Koordinasi yang baik dengan investor, masyarakat, dan instansi terkait membantu mempercepat proses pelayanan dan meminimalkan hambatan.

6. **Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan**

Rutin melakukan review kinerja dan tindak lanjut terhadap rekomendasi audit atau temuan evaluasi SAKIP mendukung perbaikan kualitas layanan.

Untuk Data capaian predikat SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dari Tahun 2021 s/d Tahun 2024 dapat di sajikan datanya sebagai berikut :

Tabel 30:

Data Indikator Predikat SAKIP Perangkat Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Dari Tahun 2020 s/d Tahun 2024.

No.	Komponen yang dinilai	2021		2022		2023		2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	28,55	30	29,75	30	29,75	30	24,50
2	Pengukuran Kinerja	25	22,19	25	20,00	25	20,00	30	23,70
3	Pelaporan Kinerja	15	15,58	15	13,11	15	13,11	15	12,30
4	Evaluasi Internal	10	5,41	10	6,95	10	7,43	25	21,25
5	Capaian Kinerja	20	11,50	20	15,50	20	15,50	-	-
	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,23	100	85,31	100	85,79	100	81,85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A		A		A		A

Berdasarkan table diatas, **Predikat SAKIP Perangkat Daerah berhasil mencapai capaian Predikat A dari tahun sebelumnya** sehingga hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP ini dapat memberikan penerapan manajemen kinerja yang terukur dan terencana sesuai target yang di inginkan.

Keberhasilan serta Solusi yang dilakukan Pada Indikator Kinerja Predikat SAKIP

Secara umum Indikator Kinerja Sasaran **Predikat SAKIP Perangkat Daerah** telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja. **Secara Analisis Keberhasilan dan Solusi** dalam pencapaian target tersebut adalah:

Keberhasilan yang dicapai

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki Dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta Perjanjian Kinerja (PK).
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat OPD hingga pejabat eselon IV.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan Evaluasi Internal untuk memantau perkembangan kemajuan pencapaian kinerja.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Data target output dan outcome dalam pencapaian strategi dan tujuan serta sasaran program dan kegiatan

Solusi dan Upaya Perbaikan yang dilakukan

Dalam rangka mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, ada beberapa solusi dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan manajemen kinerja dalam implementasi SAKIP yang diterapkan, antara lain:

1. Menyusun Pohon Kinerja yang menggambarkan sebab akibat dalam menghasilkan outcome.
2. Melakukan Monev secara berkala atas rencana aksi kinerja.
3. Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien.
4. Memanfaatkan laporan kinerja berkala untuk mencapai kinerja yang lebih baik
5. Memanfaatkan aplikasi SimKinerja Integrated dengan maksimal.

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan Pada Indikator Kinerja Predikat SAKIP

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Predikat SAKIP tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang dirancang secara terarah, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja. Berikut analisis program dan kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap capaian indikator tersebut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini berperan sebagai **fondasi tata kelola organisasi** yang memastikan seluruh urusan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Walaupun bersifat penunjang (supporting system), kontribusinya sangat signifikan terhadap kualitas perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan capaian kinerja.

Keberhasilan dalam program ini tercermin pada:

- Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan
- Tertib administrasi keuangan
- Peningkatan disiplin dan kinerja ASN
- Optimalisasi sarana dan prasarana kerja
-

Keberhasilan Indikator Kinerja Predikat SAKIP merupakan hasil sinergi berbagai program strategis yang saling mendukung. Pada Program ini terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepuasan pelayanan perizinan terhadap masyarakat.

Adapun Kegiatan yang mendukung pada pencapaian Indikator Kinerja Predikat SAKIP yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PREDIKAT SAKIP

DPMPTSP

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**DENGAN PREDIKAT
NILAI A**

Analisis Efisiensi, Sumber Daya (Anggaran)

Pada Indikator Predikat SAKIP

Analisis efisiensi dan penggunaan sumber daya (anggaran) pada indikator kinerja Predikat SAKIP adalah sebagai berikut :

Analisis Efisiensi Anggaran :

Tabel 31 :

**Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025 pada Program dan Kegiatan
Pada Indikator Predikat SAKIP**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN POKOK	PAGU ANGGARAN SETELAH REFOCUSING	JUMLAH EFISIENSI ANGGARAN	PERSENTAS E EFISIENSI ANGGARAN
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.043.000	5.043.000	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.591.050.463	2.297.913.442	(293.137.021)	11,31
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.695.480	80.259.660	(191.435.820)	70,45
	Pengadaan Barang Milik Daerah	31.014.000	31.014.000	0	0

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa	279.958.000	279.958.000	0	0
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.285.000	58.375.000	2.090.000	3,71
	3.235.045.943	2.752.563.102	(482.482.841)	14,91

Berdasarkan Tabel diatas bahwa efisiensi Anggaran pada indikator ini mencapai 14,91% Persen sehingga secara umum terjadi **penghematan anggaran sebesar 14,91%** dari total pagu yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Predikat SAKIP.

Artinya, ada sekitar **85,09% anggaran yang digunakan**, sementara target kinerja tetap tercapai dimana Program dinilai **sangat efisien**., Output tercapai dengan biaya jauh lebih rendah dari yang direncanakan. Dan Ada optimalisasi sumber daya

Persentase efisiensi anggaran sebesar 14,91% menunjukkan adanya penghematan belanja dalam pelaksanaan program Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Capaian ini mengindikasikan optimalisasi penggunaan sumber daya, di mana target kinerja tetap dapat dicapai .

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2025 Capaian Keuangan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar adalah :

PAGU ANGGARAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) TAHUN ANGGARAN 2024

ADALAH SEBESAR : Rp. 2.816.549.242 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah.

Dengan Rincian :

- **PAGU BELANJA PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**
Sebesar Rp. 2.294.145.442
- **PAGU BELANJA KEGIATAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)**
Sebesar Rp 522.403.800

Untuk PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025 adalah terdiri dari 4 Program, 9 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan.

Data Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Tahun 2025 adalah Sebagai Berikut :

RINGKASAN DATA CAPAIAN KEUANGAN TAHUN 2025_DPMPTSP	
PAGU ANGGARAN DPA PERUBAHAN TAHUN 2025	2.816.549.242
REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2025	2.694.319.017
SISA ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2025	122.230.225
PERSENTASE CAPAIAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI 31 DESEMBER TAHUN 2025	95,66

Tabel 32:

**Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025**

**LAPORAN DATA CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp.)	PERSENTAS E CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2025 (%)
		PAGU ANGGARAN DPA PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.752.563.10 2	2.630.517.67 7	122.045.42 5	95,57
1	KEGIATAN : Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.043.000	5.041.840	1.160	99,98
1	SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.333.000	1.331.840	1.160	99,91
2	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.226.000	2.226.000	0	100,00
3	SUB KEGIATAN : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.484.000	1.484.000	0	100,00

2	KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.297.913.44 2	2.222.792.69 2	75.120.750	96,73
1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.294.145.442	2.219.024.712	75.120.730	96,73
2	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.029.000	2.029.000	0	100,00
3	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1.739.000	1.738.980	20	100,00
3	KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.259.660	79.768.910	490.750	99,39
1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.810.000	1.810.000	0	100,00
2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.860.800	18.825.000	35.800	99,81
3	SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.068.280	4.068.100	180	100,00
4	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.440.000	1.440.000	0	100,00
5	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan/Material	17.057.180	17.035.000	22.180	99,87
6	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.023.400	36.590.810	432.590	98,83
4	KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.014.000	31.014.000	-	100,00
1	SUB KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana	31.014.000	31.014.000	0	100,00

	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
5	KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.958.000	233.889.535	46.068.465	83,54
1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000	7.082.135	2.517.865	73,77
2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.358.000	226.807.400	43.550.600	83,89
6	KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.375.000	58.010.700	364.300	99,38
1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.005.000	46.640.700	364.300	99,22
2	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0	0,00
3	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.370.000	11.370.000	0	100,00
II	PROGRAM : PROMOSI PENANAMAN MODAL	10.181.060	10.165.880	15.180	99,85
1	KEGIATAN : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.181.060	10.165.880	15.180	99,85

1	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	10.181.060	10.165.880	15.180	99,85
III	PROGRAM : PELAYANAN PENANAMAN MODAL	43.724.080	43.600.620	123.460	99,72
1	KEGIATAN : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	43.724.080	43.600.620	123.460	99,72
1	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	14.995.600	14.980.920	14.680	99,90
2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	14.485.840	14.478.840	7.000	99,95
3	SUB KEGIATAN : Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	14.242.640	14.140.860	101.780	99,29
IV	PROGRAM : PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	10.081.000	10.034.840	46.160	99,54
1	KEGIATAN : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.081.000	10.034.840	46.160	99,54

1	SUB KEGIATAN : Pengawasan Penanaman Modal	10.081.000	10.034.840	46.160	99,54
	TOTAL BELANJA PAGU ANGGARAN _REALISASI ANGGARAN_SISA ANGGARAN DAN PERSENTASE CAPAIAN.	2.816.549.24 2	2.694.319.01 7	122.230.22 5	95,66

**DATA CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

PAGU ANGGARAN DPA PERUBAHAN TAHUN 2025	2.816.549.242
REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2025	2.694.319.017
SISA ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2025	122.230.225
PERSENTASE CAPAIAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI 31 DESEMBER TAHUN 2025	95,66

Berikut adalah analisis naratif terkait program dan kegiatan yang serapan anggarannya tidak mencapai 100%, berdasarkan laporan capaian realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2025:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Anggaran: 95,57%

Sisa Anggaran: Rp 122.045.425

- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Realisasi 96,73%, dengan sisa anggaran Rp 75.120.750.
 - Penyebab: Sisa anggaran terutama terjadi pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, kemungkinan disebabkan oleh proses administrasi penggajian yang belum sepenuhnya selesai atau adanya efisiensi pembayaran.
 - Solusi: Perbaiki sistem penggajian dan monitoring ketat agar pencairan tunjangan bisa tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Realisasi 99,39%, sisa Rp 490.750.
 - Penyebab: Sisa anggaran kecil mungkin karena efisiensi atau pengadaan beberapa bahan/material yang dianggarkan lebih dari kebutuhan aktual.
 - Solusi: Perencanaan kebutuhan bahan/material yang lebih presisi dan evaluasi ulang proses pengadaan.
- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Realisasi 83,54%, sisa Rp 46.068.465 (paling rendah dibandingkan kegiatan lain).
 - Penyebab: Realisasi rendah terutama pada penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik (73,77%), serta jasa pelayanan umum kantor (83,89%).
 - Kendala teknis mungkin berupa keterlambatan kontrak jasa, atau penghematan anggaran untuk efisiensi biaya.
 - Solusi: Percepatan proses pengadaan jasa dan kontrak, serta evaluasi kebutuhan layanan agar tidak melebihi kebutuhan riil.

- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**
 - Realisasi 99,38%, sisa Rp 364.300.
 - Penyebab: Terdapat sub kegiatan yang tidak ada anggarannya (pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya) yang kemungkinan menghambat penggunaan anggaran di bagian tersebut.
 - Solusi: Penyelarasan anggaran dengan kebutuhan aktual serta perencanaan pemeliharaan gedung yang lebih terstruktur.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Capaian Anggaran: 99,85%

- Hampir seluruh anggaran terealisasi, sisa Rp 15.180.
- Tidak ada kendala berarti, hanya sedikit sisa yang bisa jadi disebabkan efisiensi pelaksanaan promosi.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal


Capaian Anggaran: 99,72%

- Realisasi sangat baik dengan sisa anggaran kecil Rp 123.460.
- Sub kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang perizinan berbasis risiko mencapai 99,29%, sedikit di bawah 100%, bisa jadi karena proses pelaporan yang memerlukan waktu tambahan.
- Solusi: Penguatan sistem pelaporan agar lebih cepat dan akurat.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Capaian Anggaran: 99,54%

- Sisa anggaran Rp 46.160.
- Sub kegiatan pengawasan penanaman modal belum terealisasi penuh karena mungkin proses pengawasan dilakukan secara bertahap.
- Solusi: Penjadwalan pengawasan yang lebih efisien agar realisasi anggaran optimal.



Persentase capaian anggaran yang kurang dari 100% pada beberapa kegiatan umumnya disebabkan oleh:

- **Kendala teknis:** Proses administrasi atau pengadaan yang belum rampung tepat waktu, keterlambatan kontrak atau pelaksanaan kegiatan.
- **Kendala non-teknis:** Efisiensi anggaran, perencanaan kebutuhan yang terlalu konservatif, atau adanya perubahan kebutuhan selama pelaksanaan.

Solusi:

1. Mempercepat dan memperbaiki proses administrasi penganggaran dan pengadaan agar tidak terjadi keterlambatan.
2. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap realisasi anggaran agar penyesuaian bisa dilakukan lebih awal.
3. Menyempurnakan perencanaan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan riil sehingga mengurangi sisa anggaran yang tidak terpakai.
4. Meningkatkan koordinasi antar unit terkait agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lebih lancar tanpa hambatan.

DATA PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN

Tahun 2022-2025

Tabel 33 :

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 s/d 2025

pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar

No.	Uraian	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Pagu Anggaran (Rp.)	3,804,759,676	3.057.957.512	2,724,824,115	2.816.549.242
2	Realisasi Anggaran (Rp.)	3,703,322,788	2.997.425.401	2,706,513,412	2.694.319.017
3	Persentase Capaian (%)	97,33	98,02	99.33	99.56
4	Sisa Anggaran (Rp.)	101,436,888	60.531.511	18,310,703	122.230.225

Analisis Data Perbandingan Pagu Anggaran 2022-2025, sebagai berikut :

1. Tren Capaian Anggaran

- Persentase realisasi terhadap pagu anggaran menunjukkan **peningkatan konsisten** dari 97,33% di 2022 menjadi 99,56% di 2025.
- Ini menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran semakin baik setiap tahunnya.

2. Efisiensi Anggaran

- Sisa anggaran menurun dari Rp. 101 juta di 2022 menjadi Rp. 18 juta di 2024, menunjukkan **pemanfaatan anggaran lebih optimal**.
- Meskipun ada kenaikan sisa di 2025 menjadi Rp. 122 juta, hal ini tetap kecil dibandingkan pagu anggaran.

3. Konsistensi Pengelolaan

- **Tidak ada realisasi yang** melebihi pagu, menandakan pengelolaan anggaran **terkontrol dengan baik**.

4. Indikator Kinerja SAKIP

- Persentase realisasi yang tinggi dan sisa anggaran minimal menjadi faktor yang mendukung **peningkatan predikat kinerja SAKIP**.
- Perencanaan dan pengawasan yang baik terlihat dari konsistensi pencapaian hampir 100%.

BAB IV

PENUTUP



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)** Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan menunjukkan capaian kinerja yang optimal. Sebagian besar indikator kinerja strategis berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan yang terarah, penganggaran berbasis kinerja, monitoring dan evaluasi berkala, serta komitmen seluruh jajaran pegawai dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan peningkatan investasi daerah.

Dari sisi akuntabilitas, pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.

Sasaran Strategis pada Indikator Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah mencapai target dan persentase kinerja mencapai 100%, hal ini dapat dilihat dari :

- 1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Indikator Kinerja : Indeks Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari target sebesar Predikat Sangat Baik, realisasi capaian Predikat Sangat Baik, berarti tingkat pencapaian 100 %. Keterangan: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berhasil memenuhi harapan masyarakat secara maksimal**
- 2. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas penanaman modal dengan Indikator Kinerja : Nilai Penanaman Modal dari target sebesar Rp. 600.000.000.000,- realisasi sebesar Rp. Rp. 636.205.642.832,- berarti tingkat pencapaian 106 %. Keterangan : Investasi yang masuk melebihi target, ini menunjukkan keberhasilan promosi dan kemudahan prosedur perizinan investasi**
- 3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja : Predikat SAKIP dari target Predikat A , realisasi capaian Predikat A berarti tingkat pencapaian 100 %.Keterangan : Pengelolaan kinerja dan akuntabilitas DPMPSTSP berada pada level tinggi dan konsisten dengan standar pemerintah**

Dalam pencapaian Sasaran Strategis itu ditunjang dengan anggaran operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Tahun 2025 sebesar Rp. 2.816.549.242,- dan terrealisasi sebesar Rp. 2.694.319.017,- dengan persentase capaian 95,66%. Keterangan : Realisasi anggaran cukup efisien, masih terdapat ruang optimalisasi dalam pemnfaatan anggaran

Dalam pencapaian target indikator kinerja kedepan, masih ditemukan kendala atau hambatan baik di bidang investasi dan Pelayanan Publik.

Kendala Investasi :

1. Perda RTRW dan Perbup RDTR Digital belum tersedia
2. Rencana Umun Penanaman Modal (RUPM) belum tersedia
3. Perda investasi dan kemudahan penanaman modal

4. Terbatasnya jangkauan promosi potensi daerah

Kendala Pelayanan Publik :

1. Keterbatasan SDM Pelayanan dan Sumberdaya Tim Teknis
2. Aplikasi Pelayanan perizinan terintegrasi
3. Jangkauan layanan ke Desa//Kelurahan terbatas
4. Regulasi Pelayanan Perizinan
5. Integrasi sistem informasi OSS

Adapun Strategi menangani permasalahan atau kendala dalam mendukung pencapaian kinerja yaitu :

1. Adanya kebijakan investasi
2. Promosi investasi
3. Perbaiki ekosistem investasi
4. Pelayanan publik bersih melayani terintegrasi

Rencana Tindak Lanjut dalam mendukung pencapaian kinerja ini , sebagai berikut yaitu :

- **Peningkatan kompetensi SDM** melalui pelatihan teknis dan manajerial agar mampu menangani perizinan kompleks lebih cepat.
- **Optimalisasi sistem digital** dengan pembaruan OSS dan integrasi data internal agar layanan lebih responsif dan transparan.
- **Penguatan koordinasi lintas instansi** melalui SOP terpadu dan pertemuan rutin untuk percepatan proses perizinan investasi.
- **Efisiensi anggaran** dengan monitoring berkala agar realisasi mendekati 100% tanpa mengurangi kualitas layanan.

Akhirnya, LAKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pelayanan publik yang prima, serta peningkatan daya saing investasi daerah.

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Sekian dan Terima Kasih.

Polewali, 12 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Polewali Mandar.



WENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19760522 199412 1 001



LAMPIRAN
LAKIP 2025
DPMPTSP



LAMPIRAN 1
LAKIP 2025_DPMPPTSP

PERJANJIAN KINERJA
(PK)
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali kode Pos 91315
Website; dpmptsp.polmankab.go.id. Email; dpmptsp@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **I NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Polewali Mandar

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAMSUL MAHMUD**
Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami, kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 27 Februari 2025

Pihak Kedua
Bupati Polewali Mandar,

Pihak Pertama
Kepala DPMPSTP,



I NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19760522 199412 1 001

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DPMPTSP
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TABEL KINERJA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025
1	Membbaiknya iklim investasi daerah	Nilai Investasi	656.632.116.292 (Rp)	403.320.500.000 (Rp)
2	Meningkatnya kepuasan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Indeks kepuasan pengguna pelayanan perizinan dan non perizinan	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	A	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.235.045.943	APBD
2	Promosi Penanaman Modal	Rp	165.000.320	APBD

3	Pelayanan Penanaman Modal	Rp	90.000.800	APBD
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	15.001.000	APBD
JUMLAH		Rp	3.505.048.063	APBD

Polewali, 27 Februari 2025

Pihak Kedua
Bupati Polewali Mandar,



SAMSUL MAHMUD

Pihak Pertama
Kepala DPMPTSP,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'INENGAH TRI SUMADANA'.

I NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19760522 199412 1 001

LAMPIRAN 1
LAKIP 2025_DPMP TSP

PERJANJIAN KINERJA
(PK)
PERUBAHAN
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali kode Pos 91315
Website: dpmptsp.polmankab.go.id. Email: dpmptsp@polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **I NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Polewali Mandar

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAMSUL MAHMUD**

Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami, kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 6 Oktober 2025

Pihak Pertama
Kepala DPMPTSP,

I NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19760522 199412 1 001

Pihak Kedua
Bupati Polewali Mandar,
SAMSUL MAHMUD

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2025 (PERUBAHAN)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas penanaman modal	Nilai Penanaman Modal	656.632.116.292 (Rp)	600.000.000.000 (Rp)	600.000.000.000 (Rp)
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A

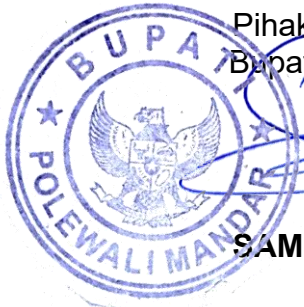
TABEL KINERJA TAHUN 2025

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

PROGRAM		ANGGARAN	ANGGARAN (PERUBAHAN)	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.886.284.007,-	Rp. 2.744.943.418,-	DAU DAN PAD
2.	Promosi Penanaman Modal	Rp. 10.181.060,-	Rp. 10.181.060,-	PAD
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 43.724.080,-	Rp. 43.724.080,-	PAD
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 10.081.000,-	Rp. 10.081.000,-	PAD
JUMLAH		Rp. 2.950.270.147,-	Rp. 2.808.929.558,-	

Polewali, 6 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Polewali Mandar,



SAMSUL MAHMUD

Pihak Pertama
Kepala DPMPTSP



I NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19760522 199412 1 001

LAMPIRAN 2
LAKIP 2025_DPMPSTSP

PENGUKURAN
KINERJA
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali kode Pos 91315
Website: dpmpmsp.polmankab.go.id. Email: dpmpmsp@polmankab.go.id

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TABEL KINERJA TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	CAPAIAN TARGET KINERJA	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1 Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Predikat Sangat Baik	Predikat Sangat Baik	100%
2	Meningkatnya kualitas penanaman modal	1 Nilai Penanaman Modal	Rp. 600.000.000.000,-	Rp. 636.205.642.832,-	106%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Predikat SAKIP	Predikat A	Predikat A	100%

Polewali, 2 Januari 2026

Kepala Dinas,



L NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19760522 199412 1 001

LAMPIRAN 3
LAKIP 2025_DPMPPTSP

REALISASI
ANGGARAN
TAHUN 2025

KINERJA KEUANGAN

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (Periode 1 Januari 2025 Sampai dengan 31 Desember 2025) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PROGRAM	PAGU DPA PERUBAHAN 2025	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	PERSENTASE CAPAIAN
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.752.563.102	2.630.517.677	122.045.425	95,57
PROMOSI PENANAMAN MODAL	10.181.060	10.165.880	15.180	99,85
PELAYANAN PENANAMAN MODAL	43.724.080	43.600.620	123.460	99,72
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	10.081.000	10.034.840	46.160	99,54
JUMLAH	2.816.549.242	2.694.319.017	122.230.225	95,66

Sumber Data : Aplikasi SIPD PENATAUSAHAAN DAN AKLAP Per Tanggal 31 DESEMBER 2025

RINGKASAN DATA CAPAIAN KEUANGAN TAHUN 2025_DPMPTSP

PAGU ANGGARAN DPA PERUBAHAN TAHUN 2025	2.816.549.242
REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2025	2.694.319.017
SISA ANGGARAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2025	122.230.225
PERSENTASE CAPAIAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI 31 DESEMBER TAHUN 2025	95,66

**LAPORAN DATA CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BERDASARKAN DATA PERIODE 1 JANUARI 2025 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp.)	PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2025 (%)
		PAGU ANGGARAN DPA PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.752.563.102	2.630.517.677	122.045.425	95,57
1	KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.043.000	5.041.840	1.160	99,98
1	SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.333.000	1.331.840	1.160	99,91
2	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.226.000	2.226.000	0	100,00
3	SUB KEGIATAN : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.484.000	1.484.000	0	100,00
2	KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.297.913.442	2.222.792.692	75.120.750	96,73
1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.294.145.442	2.219.024.712	75.120.730	96,73
2	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.029.000	2.029.000	0	100,00
3	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	1.739.000	1.738.980	20	100,00
3	KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.259.660	79.768.910	490.750	99,39
1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.810.000	1.810.000	0	100,00
2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.860.800	18.825.000	35.800	99,81
3	SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.068.280	4.068.100	180	100,00
4	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	1.440.000	0	100,00
5	SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan/Material	17.057.180	17.035.000	22.180	99,87
6	SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.023.400	36.590.810	432.590	98,83
4	KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.014.000	31.014.000	-	100,00
1	SUB KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.014.000	31.014.000	0	100,00

5	KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.958.000	233.889.535	46.068.465	83,54
1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000	7.082.135	2.517.865	73,77
2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.358.000	226.807.400	43.550.600	83,89
6	KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.375.000	58.010.700	364.300	99,38
1	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.005.000	46.640.700	364.300	99,22
2	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0	0,00
3	SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.370.000	11.370.000	0	100,00
II	PROGRAM : PROMOSI PENANAMAN MODAL	10.181.060	10.165.880	15.180	99,85
1	KEGIATAN : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	10.181.060	10.165.880	15.180	99,85
1	SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	10.181.060	10.165.880	15.180	99,85
III	PROGRAM : PELAYANAN PENANAMAN MODAL	43.724.080	43.600.620	123.460	99,72
1	KEGIATAN : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	43.724.080	43.600.620	123.460	99,72
1	SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	14.995.600	14.980.920	14.680	99,90
2	SUB KEGIATAN : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	14.485.840	14.478.840	7.000	99,95
3	SUB KEGIATAN : Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	14.242.640	14.140.860	101.780	99,29
IV	PROGRAM : PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	10.081.000	10.034.840	46.160	99,54
1	KEGIATAN : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.081.000	10.034.840	46.160	99,54
1	SUB KEGIATAN : Pengawasan Penanaman Modal	10.081.000	10.034.840	46.160	99,54
	TOTAL BELANJA PAGU ANGGARAN _REALISASI ANGGARAN_SISA ANGGARAN DAN PERSENTASE CAPAIAN.	2.816.549.242	2.694.319.017	122.230.225	95,66

Sumber Data : Aplikasi SIPD PENATAUSAHAAN Per Tanggal 31 DESEMBER 2025

Polewali, 2 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



ANGGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si

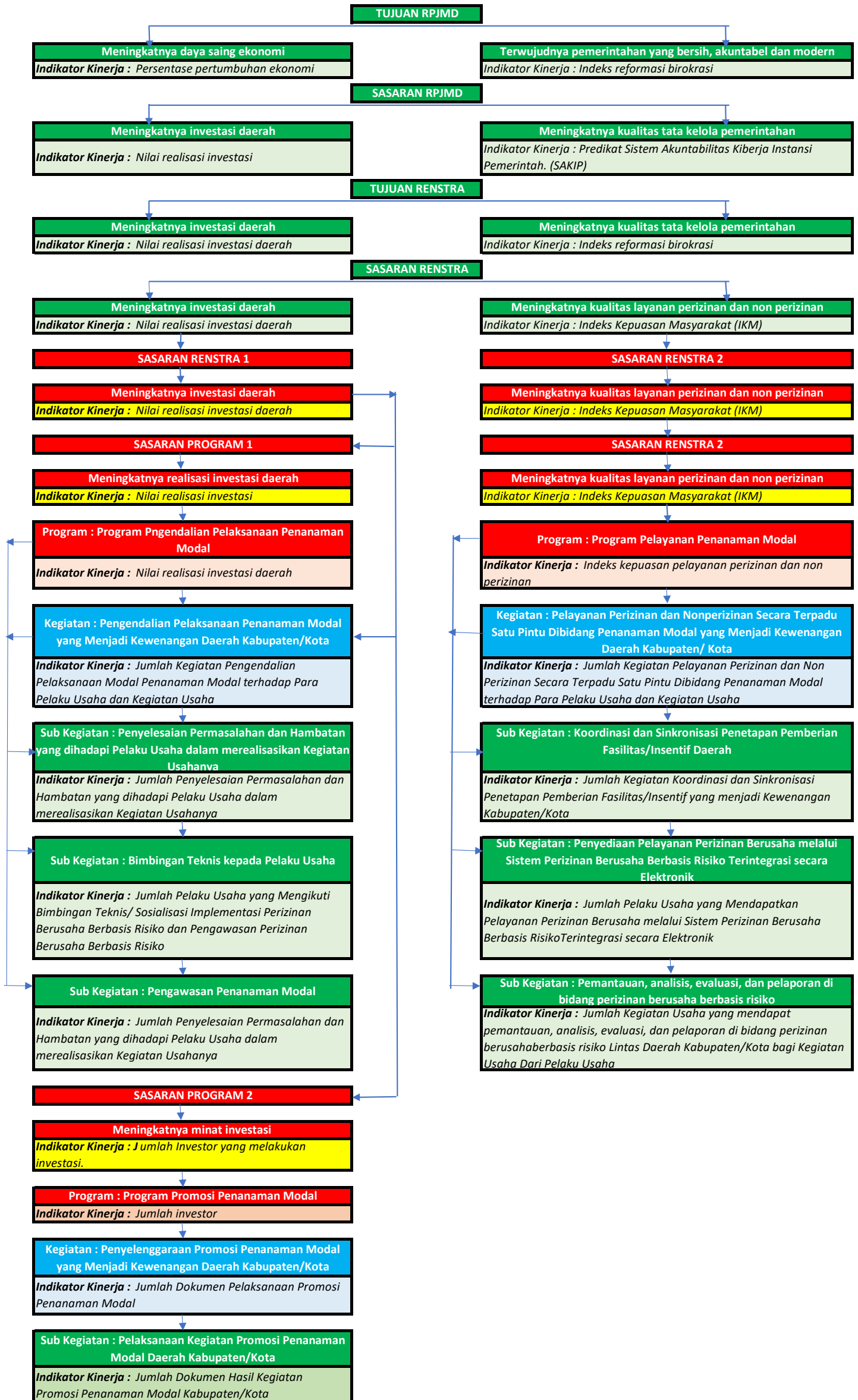
Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19760522 199412 1 001

LAMPIRAN 4
LAKIP 2025_DPMPPTSP

POHON KINERJA /
CASCADING KINERJA
TAHUN 2025

**POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025**



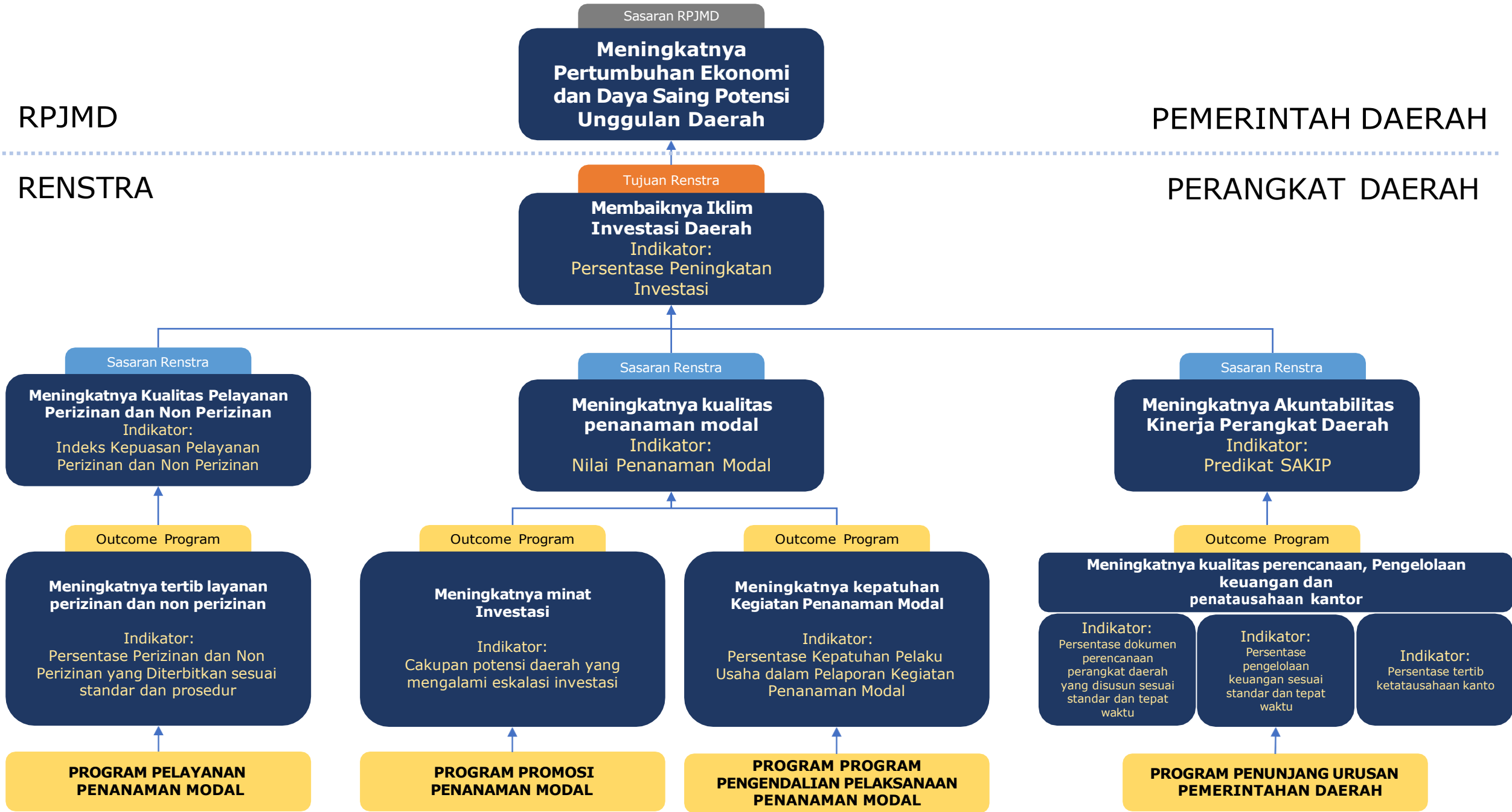
CASCADING KINERJA
DINAS PMPTSP
TAHUN 2025 - 2029

RPJMD

RENSTRA

PEMERINTAH DAERAH

PERANGKAT DAERAH



LAMPIRAN 5
LAKIP 2025_DPMPPTSP


LAPORAN MONEY
RENCANA AKSI
TAHUN 2025

RENCANA AKSI RB TEMATIK 2025 INVESTASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPOATEN POLEWALI MANDAR

Tema	Sasaran Tematik Roadmap	Indikator	Target (Rp.)	Permasalahan (bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target		Target			Jenis Kegiatan Aksi*)	Jumlah Anggaran	Unit/Satuan Kerja Pelaksana		Realisasi					% capaian	Realisasi Anggaran
									Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	600.000.000.000	Terbatasnya Pengetahuan pelaku usaha tentang pentingnya pelaporan LKPM	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam hal penyusunan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	Capaian LKPM Per Triwulan	Memberikan Sosialisasi & Bimtek LKPM pada pelaku usaha	Pelaku usaha	adanya pemahaman pelaku usaha akan melaporkan LKPM	0	0	0	0	0	Sosialisasi dan Bimtek Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Rp0	Kepala Dinas	Bidang Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0,00%	Rp0
									Pelaku usaha		0	0	0	0	0	Sosialisasi dan Bimtek Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Rp0		Bidang Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0,00%	Rp0
									Pelaku usaha		0	0	0	0	0	Sosialisasi dan Bimtek Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Rp0		Bidang Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0,00%	Rp0
								Pendampingan pengisian LKPM kepada pelaku usaha	kali		1	1	1	1	4	Pendampingan secara Langsung Pengisian LKPM kepada Pelaku Usaha setiap masuk Periode Pelaporan LKPM	Rp0		Bidang Penanaman Modal	1	1	1	1	4	100,00%	Rp0
				Kurangnya kesadaran pelaku usaha tertib administrasi pelaporan LKPM	Pelaku usaha	Meningkatnya tertib administrasi pelaporan	70%	Pegawasan Pengisian Pelaporan LKPM	kali	Adanya kesadaran Pelaku usaha dalam melaporkan LKPM secara kontinyu	1	1	0	0	2	Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan	#####	Kepala Dinas	Bidang Penanaman Modal	0	0	1	0	1	50,00%	Rp1.125.000

									Pelaku usaha		0	10	4	0	14	Pelaksanaan Inspeksi Lapangan	#####		Bidang Penanaman Modal	0	10	8	30	48	342,86	Rp6.330.000
									kali		0	0	0	0	0	Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Rp0		Bidang Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0,00%	Rp0
				Ketidak jelasan Data dan Identitas Pelaku Usaha dalam mendaftarkan NIB nya	Pelaku Usaha	Meningkatnya pelaku usaha yang telah dikonfirmasi data dan identitasnya	90%	Melakukan Penyelesaian Masalah dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kali	Adanya kejelasan Data Pelaku Usaha	0	0	0	0	0	Identifikasi Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp0	Kepala Dinas	Bidang Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0,00%	Rp0
									Pelaku Usaha		0	0	0	0	0	Rapat Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp0		Bidang Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0,00%	Rp0

Disusun
Tangal: 9 Januari 2026
Kepala Bidang Penanaman Modal dan PTSP



SUMADANA, AP, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19760522 199412 1 001

RENCANA AKSI RB GENERAL TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target (Satuan)					Jumlah Anggaran	Unit/Satuak Keja Pelaksana		Realisasi (%)				% Capaian	Realisasi Anggaran
						Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana	TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dengan OSS	100%	Penataan Infrastruktur	1 set	Tersedianya fasilitas komputer dan jaringan WIFI	1	0	0	0	1	0	Kepala Dinas PMPTSP	Kabid Pelayanan	1	0	0	0	100%	
					Penataan dan perbaikan Data Base Pelaku Usaha UMK dan Non UMK	1 dokumen	Tersedianya dokumen terpilah pelaku usaha UMK dan Non UMK	0	1	0	0	1	0	Kepala Dinas PMPTSP	Kabid Pelayanan	0	1	0	0	100%	
					Sosialisasi	5 Aktivitas	Terlaksananya sosialisasi pada pelaku usaha	1	1	0	0	0	1.100.000	Kepala Dinas PMPTSP	Kabid Pelayanan	1	1	0	0	50%	
					Implementasi pemanfaatan OSS pada pelayanan	4 Dokumen	Terlaksananya pelayanannya dengan menggunakan Aplikasi OSS	1	1	1	1	4	0	Kepala Dinas PMPTSP	Kabid Pelayanan	1	0	0	0	100%	
		Tingkat Implementasi Pemanfaatan SIM BG untuk pelayanan Perizinan yang terkait Kontruksi	100%	Penataan Infrastruktur	1 set	Tersedianya fasilitas komputer dan jaringan WIFI	0	1	0	0	1	0	Kepala Dinas PMPTSP	Kabid Pelayanan	0	1	0	0	100%		
				Rapat Koordinasi dengan Tim Teknis dan Kepala Perangkat Daerah teknis lainnya	4 kali	Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan Tim Teknis dan Kepala Perangkat Daerah Teknis	1	1	1	1	4	2.700.000	Kepala Dinas PMPTSP	Kabid Pelayanan	0	1	0	0	100%		
				Konsultasi dengan Forum Tata Ruang	1 kali	Terlaksananya konsultasi dengan Forum Tata Ruang	0	1	0	0	1	0	Kepala Dinas PMPTSP	Kabid Pelayanan	0	1	0	0	100%		
				Pemanfaatan Aplikasi	1 jenis	Terimplementasinya aplikasi Sim BG pada perizinan kontruksi	1	0	0	0	1	0	Kepala Dinas PMPTSP	Kabid Pelayanan	1	0	0	0	100%		
		Implementasi TTE pada Aplikasi		Rapat Koordinasi			1	1	1	1	4	0	Kepala Dinas PMPTSP	Kabid Pelayanan	1	1	0	0	50%		
				Penataan Infrastruktur	1 set	Tersedianya fasilitas komputer dan jaringan WIFI	1	0	0	0	1	0	Kepala Dinas PMPTSP	Kabid Pelayanan	1	0	0	0	100%		

		100%	Terintegrasi seluruh layanan non izin	1 set	Tersedianya template untuk seluruh layanan non izin	1	0	0	0	1	0	Kepala Dinas PMPTSP	Kabid Pelayanan	1	0	0	0	100%	
			Implementasi	1 set	Terimplementasinya TTE non izin pada aplikasi Srikandi	1	0	0	0	1	0	Kepala Dinas PMPTSP	Kabid Pelayanan	1	0	0	0	100%	

Disusun

Tanggal 9 Januari 2026

di Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP



[Handwritten signature]

ANGGUS TRI SUMADANA, AP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19760522 199412 1 001